

## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, kesimpulan yang diperoleh dari studi kasus ini adalah:

1. Pengalokasian anggaran penanggulangan bencana pasca implementasi RSPP belum berjalan optimal. Informasi kinerja anggaran program penanggulangan bencana belum dapat mencerminkan sinergi kegiatan lintas antar Kementerian maupun Lembaga. Dampak dari kurangnya sinergi pembagian kegiatan ini ialah masih ada duplikasi kegiatan dan anggaran pada kegiatan-kegiatan yang terkait penanggulangan bencana. Dalam upaya identifikasi dan analisis kegiatan dan anggaran di K/L pada tahap prabencana, tanggap darurat, dan pasca bencana masih ditemui kendala dalam identifikasi kegiatan dan besaran anggaran yang telah dialokasikan. Hal ini akan menjadi hambatan dalam penyajian informasi kepada pihak eksternal dan perumusan kebijakan untuk kegiatan dan pendanaan penanggulangan bencana. Sebagai pengelola fiskal yang melaksanakan perumusan kebijakan administratif pengelolaan anggaran pemerintah pusat, DJA dituntut untuk memastikan penggunaan anggaran yang berasal dari APBN secara efisien dan efektif guna mewujudkan belanja yang berkualitas. Dalam menyusun kegiatan-kegiatan penanggulangan bencana dan alokasi pendanaan yang diperlukan, *feedback* mengenai besaran kebutuhan fiskal dari APBN pada tahun anggaran sebelumnya sangat penting sebagai dasar memastikan proyeksi kebutuhan anggaran yang efisien dan efektif di tahun yang direncanakan.
2. Indonesia perlu memperkuat sistem manajemen bencana yang telah berjalan, dari sisi kelembagaan serta optimalisasi penganggaran berbasis kinerja berdasarkan RSPP untuk program penanggulangan bencana. Potret dari negara lain yaitu sistem manajemen bencana di Thailand dan Amerika Serikat, memberikan mandat yang kuat kepada kelembagaan kebencanaan dibawah Departemen Dalam Negeri yang dapat langsung menerapkan kebijakan kebencanaan pada perpanjangan pemerintah kerajaan di daerah pada negara bagian. Sehingga di Indonesia penting dilakukan peninjauan dan revaluasi kembali

terkait posisi, tugas, dan fungsi BNPB sebagai lembaga koordinator penanggulangan bencana. Selanjutnya upaya dalam mengatasi kendala-kendala belum optimalnya RSPP dalam program penanggulangan bencana dapat di inisiasi model informasi kinerja anggaran tematik bencana. Anggaran tematik bencana dapat dibangun melalui penandaan anggaran dengan melakukan identifikasi aktivitas yang menghasilkan *output* pada dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L). Penguatan informasi kinerja dalam model anggaran penanggulangan bencana juga dapat ditempuh melalui penyeragaman nomenklatur Rincian Output (RO) dan komponennya pada dokumen RKA-K/L dengan mengacu pada Klasifikasi Rincian Output kebencanaan. Kemudian sebagai perwujudan penguatan penganggaran berbasis kinerja berdasarkan RSPP, perlu disusun informasi kinerja dalam bentuk model logika program untuk dapat menilai keterkaitan antara apa yang dikerjakan dan apa yang akan didapat (*output*, *outcome*, dan *impact*). *Input* dalam elemen model logika program yaitu anggaran belanja pegawai, barang, modal, serta belanja bantuan sosial yang dialokasikan pada K/L serta Barang Milik Negara yang dimiliki K/L terkait. *Output* dalam elemen model logika program dapat diadopsi dari rencana aksi penanggulangan bencana yang merupakan dokumen kebijakan penanggulangan bencana lima tahunan. *Outcome* yang akan dicapai didapat dari dokumen perencanaan berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2019-2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP). *Goals* dari penyusunan model logika program anggaran tematik bencana dapat sebagai alat kontrol bagi DJA untuk dapat melakukan efisiensi dan efektifitas sumber daya anggaran penanggulangan bencana yang merupakan program prioritas pemerintah. Visualisasi model logika program penanggulangan bencana sebagai instrumen anggaran tematik akan mempermudah K/L dalam mengambil peran sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan. Bagi DJA juga tentunya instrumen model logika penanggulangan bencana yang di dukung sistem informasi SAKTI akan mempermudah dalam penelaahan RKA-K/L guna mewujudkan belanja berkualitas.

## B. Saran

Kasus pada penelitian ini yaitu pada lingkup Kementerian dan Lembaga pada pemerintah pusat. Ide model logika yang disusun diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap sistem perencanaan dan penganggaran serta penelitian-penelitian lainnya. Sehubungan dengan hal tersebut, maka saran dari penelitian ini adalah:

### 1. Saran Bagi Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan

- a) Menyusun Peraturan Menteri Keuangan dalam rangka membangun instrumen anggaran tematik bencana, dan Peraturan Direktur Jenderal Anggaran untuk pedoman penandaan anggaran pada sistem aplikasi SAKTI.
- b) Memperkuat dan memperkokoh kelembagaan dari BNPB sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penanggulangan bencana. Hal ini dapat ditempuh melalui penyesuaian regulasi, peninjauan kedudukan organisasi serta pemberian keleluasaan dalam pengaturan penggunaan anggaran kebencanaan pada kondisi tertentu dengan tetap memperhatikan prinsip akuntabilitas.
- c) Melakukan improvisasi sistem SAKTI untuk dapat lebih mudah dipergunakan pada menu penandaan anggaran agar lebih dimudahkan untuk digunakan (*user friendly*) dan memastikan kehandalan sistem dengan menambah *space storage* untuk penguatan kecepatan akses yang diamankan pada Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
- d) Melakukan penguatan pada Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) sehingga memastikan kegiatan-kegiatan yang bersifat berulang mendapatkan kepastian pendanaan.
- e) Memasukkan elemen-elemen model logika pada regulasi untuk dapat terintegrasi dengan proses perencanaan dan penganggaran.
- f) Melakukan evaluasi secara berkala untuk meningkatkan kualitas informasi kinerja dalam rangka penyusunan informasi kinerja tahun berikutnya berdasarkan *evidence based* capaian kinerja.
- g) Membangun komitmen untuk mitra K/L agar menggunakan informasi kinerja penanggulangan bencana secara terstandar sesuai RSPP.

- h) DJA dan Bappenas untuk memperbarui konsep pedoman RSPP dalam upaya membangun penguatan program lintas dengan memasukkan konsep *logic model* sebagai konsep dasar dalam proses perencanaan dan penganggaran.

## **2. Saran bagi penelitian selanjutnya**

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan dalam penyusunan dan analisis, yaitu difokuskan pada studi kasus hanya pada DJA dengan analisis data primer dan telaah dokumen kebijakan serta regulasi melalui konsep model logika program untuk optimalisasi Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran. Dengan dasar keterbatasan penelitian tersebut maka saran dari penulis untuk penelitian mendatang ialah:

- a) Penelitian untuk membangun anggaran tematik terintegrasi dengan tema prioritas dan proyek prioritas yang terintegrasi secara mendalam apakah sudah logis turunannya ke informasi kinerja pada K/L yang melaksanakan kegiatan/aktifitasnya.
- b) Penelitian dengan melakukan evaluasi Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran pada program lintas dikaitkan dengan konsep *money follows program* pada studi kasus tematik lainnya dengan dasar teori *Soft System Method* untuk melengkapi teori model logika, serta di eskalasi dengan konsep *collaborative governance* antar instansi pemerintah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alisjahbana, A. S., dan Murniningtyas, E. (2018). Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia: Konsep, Target dan Strategi Implementasi (PDF). Bandung: Unpad Press. hlm. 44. ISBN 978-602-439-313-7.
- Ayuningtyas, Dumilah. 2014. Kebijakan Penelitian Kesehatan: Prinsip dan Praktik. Jakarta:Raja Grafindo Persada.
- Arnold, E.P. (1986) Southeast Asia Association on Seismology and Earthquake Engineering. Indonesia: Series on Seismology Volume V
- Balogun, Ibrahim Ola. 2013. "Theories of Public Expenditures". *The Strategist Blog*, 23 Februari. Diakses pada 28 Februari 2017, <http://strategistng.blogspot.co.id/2013/02/theories-of-public-expenditures.html>.
- Bappenas, 2017. Pendekatan Money Follow Program Meningkatkan Efisiensi Belanja Prioritas, diakses pada 16 Mei 2023, dari <https://www.bappenas.go.id/id/berita/pendekatan-money-follow-program-meningkatkan-efisiensi-belanja-prioritas>
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Erlangga
- Bratton, Michael. 2013. "Measuring Government Performance in Public Opinion Surveys in Africa: Towards Experiments?". *WIDER Working Paper* No.2013/023 123.
- Bungin, Burhan. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Creswell, John W. 2014. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Approaches*. SAGE Publications, Thousand Oaks, California.
- Currstine, Teresa. 2005. "Government Performance: Lessons and Challenges". *OECD Journal on Budgeting* Vol. 5, No.1 127-151.
- Direktorat Jenderal Anggaran. *Majalah Warta Anggaran*. 2014. Edisi 8.
- Due F, John. 1985. *Keuangan Negara: Perekonomian dari Sektor Pemerintah*. Terjemahan oleh Iskandarsyah dan Arif Janin. 1985. Jakarta: UI Press.
- Halim, Abdul dan Muhammad Syam Kusufi. 2014. *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik: dari Anggaran Hingga Laporan Keuangan, dari Pemerintah Hingga Tempat Ibadah. Edisi ke-2*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hansen, Don R dan Maryanne M. Mowen. 2007. *Managerial Accounting 8<sup>th</sup> Edition*. Thomson Higher Education.
- Hansen/Mowen. 2007. *Akuntansi Manajerial*. Buku 2. Edisi 8. Salemba Empat. Jakarta.
- Hari Apriyana, Karina Rahma Nugraheni, Fatimah Wardhana. Policy Analysis of Budget Allocations for Disasters in Indonesia. Seminar Nasional Manajemen Bencana (SMBPSB 2020). Shes: Conference Series 3 (1) (2020) 164-169.
- Hastink, Annete, Nick Baileo *The Cuts: The Impact on Local Government and Poorer Communities*. Universities of Glasgow and Heriot-Watt.

- Hennink, M., Inge Hutter, dan Ajay Bailey. 2011. *Qualitative Research Methods*. Sage Publications Ltd, London.
- H. A. Simon, D. W. Smithburg and V. A. Thompson (1971), *Public Administration*; 12th edition; A. A. Knopf: New York
- Herbert Simon, cs. 1959. *Public Administration*. New York: Alfred Knopf.
- Ibrahim. 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Isnaini Annuriah M, dkk. Inacors BIG: satu referensi pemetaan indonesia / Isnaini Annuriah M ,dkk. -- Cibinong : Badan Informasi Geospasial RI, 2019
- Jick, Todd D. dan Victor V. Murray. 1982. "The Management of Hard Times: Budget Cutbacks in Public Sector Organizations". *Organization Studies* 1982, 3/2: 141-169.
- Kuncoro, Haryo dan Daniel Pambudi. 2014. "The Economic Impacts of Government Spending Cut: The Case of Indonesia". *Journal of Advanced Research in Law and Economics*, (Vol. V, Winter), 2 (10): 120-135.
- Larasati, Endang. Reformasi Pengawasan Pelaksanaan Anggaran, *Penganggaran dan Keuangan Publik* 6, no. 1 (1986): 33-49
- Leonard White. 1955. *Introduction to The Study of Public Administration*. New York: The Mac Millan Company.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Matthew Andrews, "A Theory-Based Approach to Evaluating Budget Reform," *International Public Management Journal* 5, no. 2 (2002): 135–154.
- Michel, Gregory R. 2004. *Cost Analysis and Activity-Based Costing for Government*. Government Finance Officers Association.
- Miller, Gerald R. 1983. "Taking Stock of a Discipline". *Journal of Communication* 33 (3).
- Miles, B. Mathew dan Michael Huberman. 1992. "Qualitative Data Analysis", dalam Sugiyono (Eds). 2014. *Metode Penelitian Kualitatif (rev.ed)*. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya.
- Moleong, J.Lexy. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif (rev.ed)*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi, Deddy, 2015, *Study Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*, Bandung: Alfabeta.
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. 2015. "Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.02/2015 tentang Klasifikasi Anggaran".
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. 2018. "Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.03/2018 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran".
- Kementerian Keuangan. 2022. *Nota Keuangan 2023*, buku II. halaman 6-56.
- Kementerian Keuangan. 2023. *Nota Keuangan 2024*, buku II. Halaman 6-56.
- Norman, Richard. 2007. "Managing Outcomes While Accounting for Outputs: Redefining „Public Value“ in New Zealand“s Performance Management

- System". *Public Performance & Management Review*, Vol. 30, No. 4, June 2007, pp. 536-549.
- Nasution. 2009. "Metode Research (Penelitian Ilmiah)", dalam Sugiyono (Eds). 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif (rev.ed)*. Bandung: Alfabeta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran.
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang "Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga".
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang "Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana"
- Putra, Made S. et.all. 2002. *Pedoman Administrasi*. Jakarta: Departemen Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat KMHDI.
- Politeknik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara. 2021. *Pedoman Penulisan Tesis*. Jakarta: Politeknik STIA-LAN RI.
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. 2020. *Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (2020-2024)*. Republik Indonesia.
- Rosenbloom, David H. *Public administration: understanding management, politics, and law in the public sector* / David H. Rosenbloom, American University, Robert S. Kravchuk, University of North Carolina/Charlotte, Richard M. Clerkin, North Carolina State University. — Eight edition.
- Saidi, Muhammad Djafar. 2008. *Hukum Keuangan Negara*. Depok: Rajawali Press. Setiawan Guntur. 2004. *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*. Jakarta. Balai Pustaka.
- Setiawan Guntur. 2004. *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*. Jakarta. Balai Pustaka
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabet
- Terry, George. R. 1958. *Prinsip-Prinsip Manajemen (Principles of Management)*. Terjemahan oleh Sukarna. 2011. Jakarta: Bumi Aksara.
- Tjandra, W. Riawan. 2006. *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Batang Tubuh.
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
- UNISDR Terminology on *Disaster Risk Reduction*, 2009. Hal 19-23. United Nations.
- W. Nick Carter. 2008. *Disaster Management A Disaster Manager's Handbook*. Asian Development Bank. Carter, W. Nick. ISBN 978-971-561-006-3.

## REFERENSI SITUS/WEB

- Apa yang dimaksud dengan intermediate outcome?. September 2019. Diakses pada 2 September 2023. <https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-intermediate-outcome/120681>
- Bicara Sustainability, Menkeu : Keuangan Berkelanjutan adalah Hal Penting. 08 September 2023. Diakses pada 28 September 2023. <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Menkeu-Keuangan-Berkelanjutan-adalah-Hal-Penting>
- BNPB Sosialisasikan IDRIP Kesiapsiagaan dan Resiliensi Masyarakat. 17 Desember 2022. Diakses 2 September 2023. <https://bnpb.go.id/berita/bnpb-sosialisasikan-idrip-kesiapsiagaan-dan-resiliensi-masyarakat>
- BRIN Resmi Hentikan Program Alat Deteksi Tsunami InaTEWS, Alat Canggih Pendeteksi Gempa Bumi dan Tsunami. 2 Februari 2023. Diakses 23 Agustus 2023. Laman <https://www.tvonenews.com/berita/nasional/98184-brin-resmi-hentikan-program-alat-deteksi-tsunami-inatews-alat-canggih-pendeteksi-gempa-bumi-dan-tsunami?page=2>
- Catatan Refleksi Akhir Tahun 2021 tentang Penanggulangan Bencana. 30 Desember 2021. Diakses 23 Agustus 2023. Laman <https://www.bnpb.go.id/berita/catatan-refleksi-akhir-tahun-penanggulangan-bencana-2021>
- Dampak Bencana Alam, Negatif maupun Positif. 25 Agustus 2022. Diakses pada 23 Agustus 2023. <https://bpbd.bogorkab.go.id/dampak-bencana-alam-negatif-maupun-positif/>
- Definisi Bencana. Diakses 2 September 2023. Laman <https://www.bnpb.go.id/definisi-bencana>
- Indeks pemulihan pascabencana. Diakses pada 23 Agustus 2023. [http://bencanapedia.id/Indeks\\_pemulihan\\_pascabencana](http://bencanapedia.id/Indeks_pemulihan_pascabencana)
- Indonesia Alami 3522 Bencana Alam PADA 2022. 2 Januari 2023. Diakses 24 Agustus 2023. Laman <https://dataindonesia.id/ragam/detail/bnpb-indonesia-alami-3522-bencana-alam-pada-2022>.
- Kajian Dampak Covid-19 Terhadap Kesehatan Ekonomi Pekerjaan dan Kehidupan Sosial Masyarakat di Indonesia. 4 Februari 2023. Diakses 24 Agustus 2023. Laman <https://unair.ac.id/kajian-dampak-covid-19-terhadap-kesehatan-ekonomi-pekerjaan-dan-kehidupan-sosial-masyarakat-di-indonesia>).
- Kementerian PUPR Terus Lakukan Penanganan Tanggap Darurat hingga Pascabencana Banjir Bandang di Luwu Utara. 23 Juli 2020. Diakses 14 September 2023. <https://pu.go.id/berita/kementerian-pupr-terus-lakukan-penanganan-tanggap-darurat-hingga-pascabencana-banjir-bandang-di-luwu-utara>
- Kementerian PUPR Siapkan Program Pembangunan Drainase Jalan Secara Nasional. 17 Juni 2019. Diakses 2 September 2023. Laman <https://pu.go.id/berita/kementerian-pupr-siapkan-program-pembangunan-drainase-jalan-secara-nasional>
- Konsultan Individu untuk Project Implementation di Direktorat Peringatan Dini. 6 Juli 2023. Diakses 23 Agustus 2023. Laman <https://www.bnpb.go.id/berita/lowongan-konsultan-individu-untuk-project-implementation-unit-piu-direktorat-peringatan-dini>



- Logistik dan Peralatan dalam Penanggulangan Bencana. 21 April 2015. Diakses pada 23 September 2023. <https://bnpb.go.id/berita/logistik-dan-peralatan-dalam-penanggulangan-bencana>
- Neraca Sumber Daya Kebencanaan. 23 April 2021. Diakses pada 4 September 2023. <https://data.pu.go.id/visualisasi/neraca-sumber-daya-kebencanaan>
- Perubahan Postur Dan Rincian Apbn 2020 Di Masa Pandemi Covid-19. 27 Juni 2020. Diakses 28 September 2023. <https://anggaran.kemenkeu.go.id/in/post/perubahan-postur-dan-rincian-apbn-2020-di-masa-pandemi-covid-19>
- Penandaan Anggaran (Budget Tagging) dalam RKA-K/L. 27 Juni 2023. Diakses 23 Agustus 2023. <https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/penandaan-anggaran-budget-tagging-dalam-rka-k-l-58389d43/detail>
- Pentingnya Informasi Angka Kematian untuk Pengurangan Risiko dalam Konteks Kedaruratan Bencana. 21 Mei 2022. Diakses pada tanggal 2 September 2023. <https://www.bnpb.go.id/berita/pentingnya-informasi-angka-kematian-untuk-pengurangan-risiko-dalam-konteks-kedaruratan-bencana->
- Rapat Komisi V DPR RI, Menteri Basuki Sampaikan Penyelesaian Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Selama 2021-2022. 13 April 2022. Diakses 28 September 2023. [https://sahabat.pu.go.id/eppid/page/kilas\\_berita/2997/Rapat-Komisi-V-DPR-RI-Menteri-Basuki-Sampaikan-Penyelesaian-Penanganan-Rehabilitasi-dan-Rekonstruksi-Pascabencana-Selama-2021-2022](https://sahabat.pu.go.id/eppid/page/kilas_berita/2997/Rapat-Komisi-V-DPR-RI-Menteri-Basuki-Sampaikan-Penyelesaian-Penanganan-Rehabilitasi-dan-Rekonstruksi-Pascabencana-Selama-2021-2022)
- Rakornas PB 2023, Presiden: Perubahan Iklim Adalah Hal yang Paling Ditakuti Dunia. 3 Maret 2023. Diakses 23 Agustus 2023. Laman <https://bnpb.go.id/berita/rakornas-pb-2023-presiden-perubahan-iklim-adalah-hal-yang-paling-ditakuti-dunia>
- Seminar Nasional Ibu Kota Negara (IKN) Tangguh Bencana. Diakses 14 September 2023. <https://www.youtube.com/watch?v=Xo-sf6Xjyzo>
- Stasiun Pasang Surut : BMN yang Andal dalam Mengumpulkan Informasi Geospasial di Wilayah Lautan.. 05 April 2022. Diakses pada 23 Agustus 2023. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-bogor/baca-artikel/14930/Stasiun-Pasang-Surut-BMN-yang-Andal-dalam-Mengumpulkan-Informasi-Geospasial-di-Wilayah-Lautan.html>
- Tugas dan Fungsi BNPB. Diakses 2 September 2023. Laman <https://bnpb.go.id/tugas-dan-fungsi-bnpb>
- Webinar Mitigasi Bencana Kawasan IKN, Menteri Basuki: Perhatikan Kualitas, Kelestarian Lingkungan dan Estetika. 19 November 2022. Diakses 14 September 2023. Laman <https://pu.go.id/berita/webinar-mitigasi-bencana-kawasan-ikn-menteri-basuki-perhatikan-kualitas-kelestarian-lingkungan-dan-estetika>
- World Risk Report. 2021. Diakses 23 Agustus 2023. Laman <https://relief.web.int/files/resources/2021-world-risk-report.pdf>
- What is Disaster Risk Reduction?. Diakses 28 September 2023. Laman <https://www.eird.org/americas/we/what-is-disaster-risk-reduction.html>

## Lampiran I

### PANDUAN WAWANCARA

#### A. Tujuan

- I. Untuk memperoleh data dan informasi pengalokasian anggaran tematik bencana pemerintah pusat setelah penerapan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP).
- II. Untuk memperoleh data dan informasi dalam menyusun model informasi kinerja anggaran tematik bencana pada Kementerian/Lembaga dalam rangka optimalisasi RSPP.

#### B. Pertanyaan Penelitian

- I. Pertanyaan terkait pengalokasian anggaran tematik bencana pada K/L

Tema Pembahasan	Pertanyaan	
Penanggulangan Bencana	1	Bagaimanakah pelaksanaan penanggulangan bencana di Indonesia?
	2	Apakah penanggulangan bencana yang dilaksanakan dirasa telah mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat?
	3	Masalah apa yang muncul ketika pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana?
Anggaran Tematik Bencana	1	Apa saja faktor-faktor yang mendorong pentingnya pengalokasian anggaran penanggulangan bencana?
	2	Apakah anggaran yang dialokasikan dalam RKA-K/L/DIPA telah memadai untuk melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana?
	3	Apakah pengalokasian anggaran bencana telah menerapkan <i>money follows programs</i> ?
	4	Bagaimanakah penerapan prinsip anggaran berbasis kinerja pada penanggulangan bencana?
	5	Bagaimanakah pengalokasian anggaran bencana pada Kementerian/Lembaga setelah penerapan Redesain Sistem Perencanaan Penganggaran?
	6	Apakah K/L yang tidak mempunyai tugas dan fungsi penanggulangan bencana mengalokasikan anggaran bencana?

	7	Apakah anggaran bencana yang dialokasikan telah mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat? Darimana mengukurnya?
	8	Masalah-masalah apa yang terjadi terhadap pengalokasian anggaran bencana?
	9	Menurut saudara, apa yang dimaksud dengan anggaran tematik bencana?
	10	Apakah dalam pengalokasian anggaran tematik bencana berdasarkan dapat menerapkan adanya kegiatan lintas?
Identifikasi Anggaran Tematik Bencana pada RKA-K/L	1	Bagaimana Kementerian/Lembaga mengalokasikan anggaran bencana pada RKA-K/L/DIPA?
	2	Apakah informasi kinerja K/L yang mengalokasikan anggaran bencana tetap mengacu informasi kinerja organisasi sesuai tugas dan fungsi K/L tersebut?
	3	Kementerian/Lembaga manakah yang mengalokasikan anggaran bencana?
	4	Bagaimanakah metode mengidentifikasi anggaran bencana yang sudah dialokasikan pada RKA-K/L/DIPA Kementerian Lembaga?
	5	Informasi kinerja pada RKA-K/L/DIPA mana yang dapat menjadi acuan dalam mengidentifikasi anggaran bencana?
	6	Apakah sudah terdapat penandaan/ <i>tagging</i> tertentu terkait anggaran tematik bencana pada RKA-K/L/DIPA?
	7	Apakah terdapat hubungan antara anggaran tematik bencana dengan anggaran prioritas nasional dalam RKA-K/L/DIPA?
	8	Apakah anggaran yang dikategorikan anggaran tematik bencana tersebut telah dilengkapi indikator kinerja pada setiap tahapannya? (Komponen, RO, KRO, Kegiatan)
	9	Sumber dana apa saja yang tersedia dalam pengalokasian anggaran tersebut?

II. Pertanyaan terkait model informasi kinerja tematik bencana

Tema Pembahasan	Pertanyaan	
Pertanyaan Umum	1	Bagaimana langkah yang ditempuh oleh K/L dalam menyusun anggaran penanggulangan bencana agar tidak terjadi tumpang tindih pengalokasian anggaran?
	2	Dalam penanggulangan bencana, bagaimanakah urutan tahapan prioritas yang dilakukan? (Pra Bencana, Tanggap Darurat, Pasca Bencana)
	3	Berkaitan dengan identifikasi anggaran tematik Program/kegiatan/output mana yang secara langsung dapat diperbaiki oleh program penanggulangan bencana?
	4	Berkaitan identifikasi anggaran tematik, program/kegiatan/output mana yang secara tidak langsung dapat diperbaiki oleh program?
Hubungan <i>Logic Model</i> dan Penerapannya pada RKA-K/L/DIPA	1	Bagaimana pendapat anda terkait perbedaan perumusan informasi kinerja RKA-K/L/DIPA dan teori <i>logic model</i> , sebagaimana penelitian terdahulu?
	2	Seperti penelitian terdahulu terkait pengalokasian anggaran bencana, terdapat banyak K/L yang mengalokasikan anggaran bencana di DIPA K/L tersebut, menurut saudara dengan berlandaskan pada teori <i>logic model</i> serta penerapannya pada RSPP, bagaimanakah hal ini dapat diakomodir?
	3	Apakah dimungkinkan membangun suatu instrumen anggaran tematik dalam kerangka <i>logic model</i> untuk mewujudkan anggaran yang berkualitas?
	4	Menurut saudar, bagaimana peran yang diemban oleh institusi perencanaan dan penganggaran terkait perumusan anggaran tematik ini?
	5	Menurut anda, instrument RSPP saat ini telah memberikan tools dalam mengintegrasikan anggaran bencana pada level KRO, apakah ini efektif dalam menilai informasi kinerja anggaran?

Menyusun dan Menetapkan <i>Impact</i>	1	Di Indonesia terdapat BNPB yang menjalankan fungsi penanggulangan bencana, apakah <i>impact</i> dan <i>outcome</i> anggaran tematik bencana dapat diidentikkan dengan visi dan misi BNPB sebagai LPNK penanggulangan bencana di Indonesia?
	2	Dapatkah nantinya <i>outcome/impact</i> itu dikorelasikan terhadap K/L yang mengalokasikan anggaran terhadap bencana?
	3	<i>Impact</i> apakah yang ingin dihasilkan dalam menyusun informasi kinerja anggaran tematik bencana?
	4	Kebijakan/dokumen apakah yang dapat dirujuk dari penentuan <i>outcome</i> dan <i>impact</i> tersebut?
	5	Apakah telah ada ukuran tertentu dalam mengukur keberhasilan pengalokasian anggaran bencana guna mencapai <i>outcome/impact</i> tersebut?
Menyusun dan Menetapkan <i>Outcome</i>	1	Perumusan <i>outcome</i> tersebut dapatkah didasarkan pada peraturan yang berlaku saat ini?
	2	Apakah selama ini telah ada ukuran tertentu dalam mengukur keberhasilan pengalokasian anggaran bencana guna mencapai <i>outcome</i> tersebut?
	3	Dapatkah nantinya <i>outcome</i> itu dikorelasikan terhadap K/L yang mengalokasikan anggaran bencana?
	4	Bagaimana perumusan <i>outcome</i> pada jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek dalam penanggulangan bencana?
Menyusun dan Menetapkan <i>Activities</i>	1	Bagaimanakah K/L menyusun <i>activities/kegiatan</i> berdasarkan RSPP dalam rangka pengalokasian anggaran kebencanaan saat ini?
	2	Dapatkah BNPB mengkoordinasikan seluruh kegiatan penanggulangan bencana sebagaimana penelitian terdahulu?
	3	Kebijakan apakah yang dapat digunakan untuk menyusun kegiatan/langkah-langkah dalam mencapai perubahan?
	4	Langkah atau <i>activities</i> apakah yang harus disusun dalam mencapai perubahan ( <i>outcome/impact</i> ) yang diharapkan tersebut? Perubahan disini sudah mengerucut pada Pra Bencana, Tanggap Darurat, dan Pasca Bencana.

Menyusun dan Menetapkan Output	1	Bagaimanakah K/L menyusun output berdasarkan RSPP dalam rangka anggaran kebencanaan saat ini?
	2	Apa saja output alokasi anggaran bencana yang dihasilkan pada RKA-K/L / DIPA?
	3	Apakah output anggaran tematik bencana yang disusun setelah RSPP telah mencerminkan kualitas dan kuantitas yang diperlukan untuk menghasilkan hasil yang di harapkan?
	4	Apakah pengalokasian anggaran bencana telah menggunakan informasi kinerja yang sudah distandarkan?
	5	Kaidah-kaidah apakah yang dapat diacu dalam perumusan output sesuai kebijakan yang berlaku?
	6	Bagaimanakah output yang dapat disusun dalam kerangka <i>logic model</i> terkait anggaran tematik bencana ini?

## Lampiran 2

### PANDUAN TELAAH DOKUMEN

#### A. Tujuan

- I. Untuk memperoleh data dan informasi pengalokasian anggaran tematik bencana pemerintah pusat setelah penerapan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP).
- II. Untuk memperoleh data dan informasi dalam menyusun model informasi kinerja anggaran tematik bencana pada Kementerian/Lembaga dalam rangka optimalisasi RSPP.

#### B. Sumber Data dan Informasi

<b>Tema Pembahasan</b>	<b>Dokumen Sumber</b>	
Penanggulangan Bencana	1	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 sebagai legalitas penanggulangan bencana di Indonesia.
	2	Peraturan Pemerintah Nomor Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
Pengalokasian Anggaran Penanggulangan Bencana	1	Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional
	2	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran dan Akuntansi Pemerintah
	3	Surat Edaran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan terkait Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran
Informasi Kinerja Anggaran Tematik Bencana	1	Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran - K/L DIPA 2021-2023
	2	Nota Keuangan TA 2021-2023
	3	Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2019-2024
	4	Jurnal, Penelitian, Tesis terkait Anggaran Bencana

## Lampiran III

### PEDOMAN OBSERVASI

Dalam pengamatan (observasi) yang dilakukan adalah bagaimana proses penyusunan anggaran dalam tahapan penyusunan informasi kinerja dilakukan meliputi:

#### A. Tujuan:

Untuk memperoleh informasi dan data baik mengenai proses penyusunan anggaran, maupun respon *key informant* penelitian.

#### B. Aspek yang diamati:

1. Suasana/iklim kerja secara akademik maupun sosial.
2. Proses wawancara dengan *key informant* terkait komunikasi dan tata bahasa.
3. Proses *Forum Grup Discussions* saat terjadi adanya dialog antar aktor atau institusi yang berkepentingan.
4. *Persons* atau orang yang berperan dalam penyusunan anggaran.



## LAMPIRAN IV

### Transkripsi Wawancara dengan Analis Anggaran Ahli Madya Direktorat Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan kebudayaan

Hari, tanggal : Rabu, 12 September 2023  
 Lokasi : Lantai 7 Gedung Sutikno Slamet  
 Durasi : 00:33:59  
 Pewawancara : G  
 Partisipan : AR

Ket	Transkrip Wawancara	Ref
G	Maksud saya datang kesini untuk mendapatkan informasi untuk penelitian saya terkait anggaran tematik bencana pak	
AR	Kalau masnya mau lihat anggaran tematik ya mas. Sepertinya itu belum ada di klaster tematik kita ya. <b>Anggaran bencana di APBN itu ya sebenarnya dialokasikan di K/L sesuai dengan aturan yang berlaku gitu lho, dalam pengalokasian anggaran harus ada dasar hukumnya kan. supaya bisa didanai APBN.</b> Jadi sebenarnya anggaran tematik bencana ini ya harusnya dibangun dari bagaimana sih dasar hukum yang ada dan berlaku. Coba masnya baca Undang-Undang 24 Tahun 2008, PP 21 tahun 2008, PP 22 tahun 2008 seingat saya beberapa peraturan itu yang mendasari adanya program penanggulangan bencana	AR-1
G	Jadi <i>basicnya</i> tetap dari peraturan ya pak	
AR	<b>Lho ya kalo K/L mengalokasikan anggaran itu dasarnya ya peraturan to, mau itu undang-undang, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, kemudian tinggal ditelaah urgensi dan keterkaitannya dengan prioritas pemerintah...”</b>	AR-2
G	Baik Pak, berarti saya catat disini harus ada dasar hukumnya dulu.	
AR	Iya benar mas.	
G	Kalo secara umum anggaran tematik ini korelasinya sama RSPP apa ya pak? Sebenarnya ini dilema di kita sebagai regulator, tagging itu kan tempatnya di RO, jadi lebih kena sebenarnya dibandingkan di level KRO. Alasannya apa pak?	
AR	<b>Tujuan penerapan RSPP ya itu tadi, menjamin belanja yang dialokasikan berkualitas, artinya sesuai antara apa yang dikeluarkan oleh negara dengan manfaat yang di dapat,</b> kalo anggaran tematik kan mengelompokkan dengan tema tema tertentu, misalnya stunting, kesehatan, pendidikan. Mas coba <i>search</i> di bi kita, disana coba cek ada berapa tematik	AR-3

	anggaran kita... maaf sekalian saya juga belum update kondisi terbarunya soalnya ada pekerjaan lain di kesehatan ini.	
G	Menu yang mana ya pak, maaf saya agak lupa, seingat saya RSPP itu tidak perlu <i>tagging</i>	
AR	Di menu Prioritas mas disana ada nawacita, janji presiden dan tematik	
G	Baik pak. Jadi <i>tagging</i> itu ternyata masih perlu ya pak di satu sisi. Saya baca di PMK 62 itu sejak adanya RSPP <i>tagging</i> itu sudah diminimalisir dan tidak diperlukan kesannya	
AR	Sebenarnya ini dilema di kita sebagai regulator, <i>tagging</i> itu kan tempatnya di RO, jadi lebih kena sebenarnya dibandingkan di level KRO.	
G	Alasannya apa pak?	
AR	<b>Output basisnya, karena tingkatan ini dapat dipantau capaiannya dan besaran anggarannya berapa... memudahkan juga to ngidentifikasi dan menelaah gimana keterkaitannya dengan tahap-tahap yang ada di kegiatan bencana itu.</b> <b>RO itu kan adalah hasil output spesifik kan ya dari proses yang dilakukan K/L. idealnya penandaan pada level RO bisa langsung tahu kan anggarannya berapa secara detil, kan sudah memuat sumber dana juga... Kalo level KRO dia masih nyampur nyampur, kita harus milah data lagi, nyambung ke anggaran tematik tadi kita bakalan agak sulit untuk <i>tracing</i>, apalagi untuk RO yang diluar bencana, tadi nanyanya anggaran tematik bencana kan.</b>	AR-4  AR-5
G	Betul pak, saya itu berfikir begini pak A, jadi saya sudah coba mempelajari kemarin beberapa penelitian dari anggaran yang terkait bencana saya lihat kok kompleks sekali ya. Indikasi awal banyak duplikasi ditemukan.	
AR	Memang kalo itu dibutuhkan kerjasama lintas sektor mas, mitranya di DJA kan beda beda, terus kebijakan sebelum dari DJA pada saat nyusun renja juga berpengaruh, jadi memang betul memang sangat kompleks. <b>Perlu koordinasi dan sinergitas terkait kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dimasing-masing Kementerian/Lembaga sesuai tugas pokok dan fungsinya</b>	AR-6
G	Saya jadi berfikir terkait <i>money follows program</i> pak, tapi kan anggaran bencana ini menyebar begitu pak	
AR	<b>Masalah klasik dalam penganggaran kita yaa itu tadi, sulitnya mengkoordinasikan supaya menghindari tumpang tindih pengalokasian anggaran dalam kegiatan karena berbagai K/L sejatinya melakukan kegiatan yang sama.</b>	AR-7

G	Solusinya apa ya pak, saya sebenarnya kegambar tusi kita kan lintas sektornya kurang kuat ya pak	
AR	<b>Solusinya dari duplikasi ini ya itu tadi kembali ke tugas pokok dan fungsi masing-masing K/L dengan koordinasi yang dipimpin oleh BPNB.</b>	AR-8
G	Kalo program penanggulangan bencana itu apakah termasuk program lintas pak?	
AR	Program penanggulangan bencana itu ya pelaksanaannya lintas mas, tapi secara penganggaran itu kan tersebar. Program lintas itu misalnya <b>program teknis ada yang lintas lembaga, seperti program riset dan inovasi yang ada di BRIN dan BAPETEN</b> , bukannya mas pernah bermitra juga dengan mereka ya?	AR-9
G	Benar pak. Menurut bapak program lintas ini pendanaannya bagaimana pak? Maaf pak saya melebar soalnya penting tahu konsep program lintas ini.	
AR	<b>yaa program lintas ini belum efektif ya, sehingga potensi duplikasi masih ada.</b> Program lintas itu sebenarnya ya keseluruhan <i>puzzle</i> dalam lingkup <i>money follows program</i> , namun kenyataannya karena kebanyakan atribut jadi mengesankan struktur anggaran kita ini tidak simple, ada nawacita, ada janji presiden, ada prioritas nasional, nah ini memang bagi mereka yang awam malah bikin bingung... Sementara program-program itu juga sekarang lagi digalakkan supaya ke masyarakatnya itu kena dampak yang bagus, artinya berdampak langsung, jadi belum tentu misal program riset inovasi yang di BRIN tadi merupakan program yang dipahami masyarakat. Masyarakat <i>kan</i> taunya Cuma program pemerintah misal a b dan c, tp itu merupakan bagian kecil dari program yang itu tadi, yang secara tusi ke lembaga dan secara tematik-tematik tadi.	AR-10
G	Baik pak, lanjut ke anggaran tematik bencana ya pak, menurut bapak bagaimana?	
AR	Anggaran tematik ini kan identik dengan melakukan tagging atau penandaan ya. Jadi tahu nanti besarnya anggaran berapa, secara RO dan secara detil sumber dana jadi ketahuan posisinya. Mas coba cari perasaan saya punya filenya pedomannya dikasih kawan BKF. Sebentar ya.	
G	Baik pak	
AR	Nha tadi bicara tematik... <b>tagging Anggaran Tematik Bencana ini baru dalam tahap rekomendasi program <i>secondment</i> Kementerian Keuangan, <i>existing</i> telah berjalan penandaan secara KRO, sudah ada rumahnya walau tidak semua anggaran bencana masuk kesitu.</b>	AR-11

G	Saya cuma dengar saja pak, jadi saya tertarik menulis, kan memang belum ada. Jadi menurut bapak layakkah ketika penanggulangan bencana ini menjadi suatu anggaran tematik?	
AR	<b>“Yaa... memang seharusnya dituangkan dalam lingkup anggaran tematik penanggulangan bencana supaya terintegratif dan mudah untuk di <i>tracing</i> ketika ada aspek yang tidak berjalan sesuai perencanaan...”</b>	AR-12
G	Jadi menurut bapak anggaran tematik itu dapat dipahami seperti apa?	
AR	<b>Pengalokasian anggaran pada Kementerian Lembaga untuk suatu tema tertentu misal kita bicaranya anggaran bencana itu dipengaruhi kebutuhan yang utama kemudian target, serta jumlah pagu nya dari proses <i>top down</i>.</b>	AR-13
G	Penyusunannya apakah secara regular seperti kita menyusun dan menelaah RKA-K/L?	
AR	<b>Siklusnya mengikuti siklus penganggaran mas.</b> Untuk menyusun anggaran tematik diperlukan tagging di level RO mas. <i>Tagging</i> itu diberikan ketika pembahasan pagu anggaran, setelah pagu indikatif. RKA-KL itu mulai ada dan disusun kan ketika pagu anggaran ya mas. Jadi disitu bisa mulai dilakukan tagging anggarannya misal terkait bencana ini yang mas inisiasi, atau anggaran pendidikan yang juga sama konteks nya menyebar di dalam RKA-K/L berbagai kementerian, seperti Kemdikbudristek, Kemenag, dan Kementerian yang punya PTKL, seperti STIA LAN sekolah mas itu kan juga PTKL yang mungkin mengelola PNBPN ya atau BLU... Jadi seperti itu ya gambarnya kira kira mas. Ini juga berpengaruh dengan <b>Penyusunan anggaran sesuai siklus, kan kelihatan ya merupakan gabungan antara <i>bottom up</i> dan <i>top down</i></b> , jadi seperti yang kita laksanakan sehari hari, menyusun RKA-K/L dengan <i>schedule</i> yang sudah ditetapkan sesuai pagu, oleh unit satker yang bersangkutan. Nanti setelah ini coba mas cari referensi terkait anggaran tematik yang lainnya, sepertinya sudah ada panduannya disusun sama teman-teman BKF.	AR-14 AR-15
G	Baik pak, nanti saya coba cari referensi tersebut. Oh iya terkait <i>bottom up</i> itu saya khawatir pemahamannya salah. Apakah itu merupakan inisiasi satker nyusun dulu indikasi kebutuhan anggarannya atau seperti apa ya pak?	
AR	<b><i>Bottom up</i> berarti satker menyusun output apa yang akan dihasilkan, dengan batasan anggaran yg ditentukan secara top down dari level pimpinan tertinggi.</b> Jadi tetap menggabungkan antara kebijakan dan kebutuhan. Kalo dibilang kebutuhan anggaran, mestinya semua ya seringnya bilang kurang ya mas. Balik ke konteks anggaran bencana, ini agak	AR-16

	beda mas, nanti coba hubungi mba T untuk lebih detilnya, karena beliau lebih mengerti RKA-K/L terbaru dibandingkan saya, bisa juga ke bu E, nanti diskusi aja. Idenya bagus ini mas siapa tahu bisa menjadi inovasi Dit PMK kan kalo ditulis sebagai penelitian...	
G	Baik pak saya akan coba diskusi dengan mba tri dan bu evi pak. Sementara cukup dulu pak ya dari saya, nanti setelah diskusi insyaallah saya butuh pencerahan dari bapak lagi.	
Diskusi Sesi Kedua Jumat 15 September 2023		
G	Bapak, ijin diskusi terkait hasil penelitian kemarin.	
AR	Ya mas silahkan, sudah ketemu kah datanya mas?	
G	Kebetulan sudah saya tarik semua pak, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan.	
AR	Sudah dipilah datanya untuk tahapan-tahapannya, kan ada prabencana, tanggap darurat dan pasca bencana ya waktu itu kita diskusi.	
G	Sudah saya coba pilah dan identifikasi masing-masing pak, memang fluktuatif... untuk data saya kira kita bisa tracing memang tahapan-tahapannya seperti apa. Namun untuk mensinkronkan dengan kegiatan-kegiatan di renas ya pak, ini memang luas sekali.	
AR	Itu yang kemarin saya maksudkan mas, memang seharusnya kita berfikir kesitu, artinya begini renas itu sebagai acuan karena memang sudah produk kebijakan, jadi kegiatan penanggulangan bencana harusnya memang mengacu dengan dokumen itu, kan sudah kebijakan ya. Coba nanti mas susun apa saja inti dari kegiatan renas itu di klusterkan, lihat KRO nya apakah sudah memadai ataukah belum. Itu bagus buat bahan untuk melihat itu tadi, keseluruhan kegiatan penanggulangan bencana. Sebenarnya itu isu yang sangat strategis, seperti pendidikan misalnya, mana mana yang terlibat, mana mana yang berperan, termasuk KL bencana, sesuai aturan kan memang ada kolaborasi antar actor untuk kegiatan ini, mas bisa cek di renas semuanya sudah ada kan.	
G	Baik pak benar, setelah ini saya coba akan menyusun <i>klusteringnya</i> .	
AR	Tadi datanya menemukan apa mas?	
G	Saya menemukan ternyata dari penelitian terdahulu itu belum menggambarkan besarnya anggaran bencana pak. Untuk mitigasi saya menemukan alokasi belanja modal yang besar di Kementerian PUPR misalnya pak.	
AR	Kementerian PUPR itu dulu mitra saya mas, dia membangun bendungan itu untuk mitigasi bencana, Namanya belanja infrastruktur mestinya akan lebih besar angkanya dengan	

	<p>belanja untuk bimtek swakelola. Bendungan itu sebenarnya termasuk aliran airnya dan prasarana sampai itu berfungsi. Mas bisa perkuat identifikasi apa RO kementerian PUPR. Infrastruktur ini merupakan salah satu prioritas presiden, membangun anggaran tematik ini bisa dibilang mengelompokkan sesuatu yang mestinya tahapan sesuatu yang lain. Nanti terlihat sebenarnya anggarant tematik itu beririsan, namun ini bukan duplikasi, tapi ya memang tahap tagging saja untuk memberikan atribut. Narasinya mungkin bisa dibangun nanti, untuk belanja infrastruktur iya, namun dalam rangka penanggulangan bencana misalnya begitu mas.</p>	
G	<p>Baik pak, terkait tanggap darurat tahun 2020 itu kan agak tinggi angkanya ya naik sekitar dua kali lipat dari tahun 2019, menurut data RKA-K/L itu buat penanganan covid, apa benar begitu pak?</p>	
AR	<p>Waktu itu saya juga dapat penugasan untuk kompilasi, seingat saya memang iya bahwa <b>kenaikan anggaran bencana pada tahun 2020 tentunya untuk tanggap darurat penanganan COVID-19 yang angkanya melonjak waktu itu</b>, seiring dengan penetapan dari Satgas COVID 19.</p>	AR-17

**POLITEKNIK**  
**STIA LAN**  
**JAKARTA**

**Transkripsi Wawancara dengan Analis Anggaran Ahli Muda  
Direktorat Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan kebudayaan**

Hari, tanggal : Kamis, 14 September 2023  
 Lokasi : Lantai 7 Gedung Sutikno Slamet  
 Durasi : 00:45:41  
 Pewawancara : G  
 Partisipan : TM

Ket	Transkrip Wawancara	Ref
G	Ya mbak, ijin ngobrol-ngobrol terkait anggaran kebencanaan ya mbak.	
TM	Apanya ya mas?	
G	Ini mba, saya kan dulu menginfokan bikin tesis terkait anggaran penanggulangan bencana, jadi saya harus bertanya ke mitra BNPB dong ya	
TM	Oh itu, monggo mas <i>hehehe</i> .	
G	Saya langsung nanya aja mungkin ya mba. Apa saja faktor-faktor yang mendorong pentingnya pengalokasian anggaran penanggulangan bencana?	
TM	Wah berat nih sepertinya, saya coba jawab dengan yang saya tahu ya. Penanggulangan bencana kan memang suatu yang kompleks ya... Cuma setahu saya begini <b>Kalo bicara anggaran penanggulangan bencana, ndak bisa cuma lihat BPNB, kan masnya sudah tahu toh kalo <i>money follow program</i> itu keroyokan gitu melaksanakannya, tapi ya seharusnya ndak lepas dari tusi.</b>	TM-1
G	Lho berarti bener dong kemarin yang kita diskusi penelitian terdahulu itu, jadi memang anggaran penanggulangan bencana itu sebenarnya tersebar pada beberapa K/L. Terus RSPP belum efektif kah mba, kan ada program lintas ya.	TA
TM	RSPP sih sebenarnya sejak diimplementasikan sudah banyak kan ya KRO bencana yang ada buat nampung anggaran bencana, jadi sebenarnya memang itu baru potongan kecil saja. Belum bisa mewadahi semua anggaran bencana itu sendiri. <b>“tidak semua anggaran bencana itu masuk ke KRO kebencanaan mas, banyak yang belum sesuai, K/L cenderung melihat dari kegiatannya apa, bukan muatan untuk mendukung kebencanaan itu”</b>	TM-2
G	Kalo munculin KRO baru bagaimana mba, apakah merupakan solusi yang bagus?	
AR	Itu kan ranahnya Bappenas ya, dia yang menghimpun KRO-KRO baru, selama ini belum ada sih usul tambahan KRO baru	

	terkait kebencanaan, jadi masih pake list yang lama. Coba aja tarik data di bi, nanti terus di rekap yang ada kata bencananya kan muncul tuh. Aku lupa jumlahnya ada berapa KRO. Kalo di BNPB sendiri sih ada yang pake KRO bencana ada yang diluar bencana jadi nyampur nyampur kan tuh ya	
G	Trus kalo motret anggaran bencana keseluruhan di masing-masing K/L ga bisa dong mba. Solusinya bagaimana?	
TM	Nha itu bukannya kemarin sudah tak certain kalo memang butuh dibentuk anggaran tematik ya terkait kebencanaan	
G	Oh. iya inget, cocok nih sama ceritanya pak AR, jadi anggaran tematik bencana memang sudah dicanangkan, progressnya gimana mba?	
TM	Iya terkait <b>tagging Anggaran Tematik Bencana ini baru dalam tahap rekomendasi program secondment Kementerian Keuangan, existing telah berjalan penandaan secara KRO, sudah ada rumahnya walau tidak semua anggaran bencana masuk kesitu. Sampai saat ini belum ada tagging, masalahnya belum ada inisiasi dari kita ya untuk tindak lanjut ini.</b>	TM-3
G	Emang sepeenting apa mba?	
TM	<b>Anggaran tematik itu buat rekomendasi menyusun kebijakan fiskal, jadi pemerintah nantinya bisa melihat perlu dana segini lho untuk tema ini...</b> anggaran tematik kan memang di tagging buat tahu isinya apa, besaran anggarannya berapa, langsung menjaring di RO mana, walaupun bukan KRO kebencanaan.	TM-4
G	Terus misalnya nanti dibentuk anggaran tematik apa nanti melalui proses tagging?	
TM	Iya, dengan proses tagging di RO, <b>ya untuk melihat anggaran bencana secara riil berapa dialokasikan, masnya tentunya bisa melihat pada level RO toh, kan disitu sudah ada besaran anggaran.</b> Kalo di KRO kan dia masih nyampur tuh, sulit identifikasi besarannya jadinya. <b>ya untuk melihat anggaran bencana secara riil berapa dialokasikan, masnya tentunya bisa melihat pada level RO toh, kan disitu sudah ada besaran anggaran.</b>	TM-5 TM-6
G	Saya catat disini berarti anggaran tematik penanggulangan bencana tetap ditagging level RO seperti anggaran tematik lainnya. Selanjutnya apa anggaran yang dialokasikan dalam RKA-K/L/DIPA telah memadai untuk melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana?	
TM	Penanggulangan bencana kan sudah ada cadangan dana ya di BA-BUN dana siap pakai dan dana kontingensi. <b>Dana Kontijensi, dialokasikan pada DIPA BNPB, langsung drop</b>	TM-7



	<p>dari BA-BUN. Jadi Dana kontijensi itu adanya di DIPA BNPB, DSP itu adanya BA-BUN untuk berjaga-jaga kalo kondisi darurat...</p> <p>Selain dana kontijensi, dana siap pakai, sebenarnya banyak K/L yang memakai KRO bencana dalam pengalokasian pendanaan bencana serta kegiatan yang terkait peraturan kebencanaan. Nanti kalo mau tahu besarnya coba ngobrol sama pak M. Beliau kan dulu lama di BA-BUN, mestinya lebih paham bagaimana pengelolaannya disana.</p>	TM-8
G	Kalo nyusun anggaran penanggulangan bencana rujukan dokumen yang buat pijakan apa mba?	
TM	Untuk dokumen yang bisa diacu yaitu dokumen RPJMN, disana tertuang apa yang menjadi focus pembangunan, termasuk penanggulangan bencana, Renas juga dapat digunakan sebagai referensi, karena telah menghimpun berbagai dokumen yang akan diwujudkan dalam aksi nyata. Bisa <i>browsing</i> ada kok renas, kan itu dokumen nasional jadi dipublikasikan untuk diketahui semua elemen didalamnya.	TM-9
G	Trus terkait pengalokasian anggaran bencana telah menerapkan <i>money follows programs</i> ? Soalnya saya denger karena penerapan itu kan jadi duplikasi ya?	
TM	kegiatan lintas ini belum efektif ya, karena memang anggarannya kan masih terkapling-kapling dalam masing-masing organisasi, akhirnya bisa inefisiensi karena memang seharusnya yang berlebih bisa dialihkan ke unit yang kurang dengan pendanaan secara sinergi. Jadi penanggulangan bencana ini kan perlu koordinasi dan sinkronisasi program ya untuk satu tema yaitu bencana. Namun sampe sekarang anggaran tematik bencana itu belum ada di sistem kita dan kebijakan kita. Dampaknya kan anggaran penanggulangan bencana itu tidak dapat di potret secara utuh gitu ya komprehensif bahasanya. Sekat-sekatnya cuma KRO yang notabene ini juga belum utuh bisa motret tahap anggaran kebencanaan dari prabencana tanggap darurat dan pasca bencana soalnya itu tadi ada alokasi anggaran terkait bencana yg berada diluar KRO kebencanaan itu banyak.	TM-10
G	Arahnya ke duplikasi ya? Di KL mana misal ngadain bintek terus di KL ini juga padahal bimteknya sejenis.	
TM	Masih mas, duplikasi itu masih ada, utamanya buat bantuan-bantuan, biasanya ada kepentingan tertentu kenapa K/L itu tertarik dalam mengalokasikan	TM-11

G	Coba nanti saya identifikasi deh RO-RO nya dengan petunjuk tadi narik data di bi. Trus bagaimanakah penerapan prinsip anggaran berbasis kinerja pada penanggulangan bencana?	
TM	Ya kalo ABK sepertinya semua K/L menerapkan, jadi masing-masing menyusun sesuai indikatornya kan penerjemahan dari SS, Program, Kegiatan, terus sampe level detil. Masing-masing kan sudah ada indikator-indikatornya itu ya. Jadi memang kalo ABK ini sudah diterapin di masing-masing K/L Cuma untuk khusus penanggulangan bencana bagaimana ngukur kinerjanya dari level tertinggi smp terbagi dalam K/L yang ngalokasikan anggaran bencana ya itu tadi masih nyebar. Instrumennya belum ada. Beda BA ya mestinya beda prioritas kan ya. Soalnya informasi kinerjanya kan dia mengacu pada tusi organisasi masing masing BA.	
G	Berarti berdampak ya dengan program prioritas pemerintah?	
TM	Ya dampaknya ya itu tadi sulit ngidentifikasi berapa anggaran buat nyusun <i>baseline</i> , kontrol jadi sulit, kemudian menilai keberhasilan dampak anggaran bencana juga jadi sulit, kan tersebar.	
G	Kementerian/Lembaga manakah yang mengalokasikan anggaran bencana mba dari pengalaman mba bermitra dengan BNPB?	
TM	Setahu saya ada BNPB, Bappenas untuk kebijakan-kebijakan pembangunan, terus Basarnas, Kementerian PUPR dalam tahap mitigasi yang bangun-bangun waduk dan bendungan atau DAM terus ada Kementerian Sosial, ada Kementerian KLHK. Kalo mau identifikasi tarik aja semua data RKA-K/L kementerian lembaga terus ya coba di sisir satu persatu dari KRO dulu, terus coba lihat dioutputnya ada ngga yang terkait bencana.	
G	Maksudnya? Bikin filter di RO gitu ya, supaya bisa kejaring dari nomenklatur	
TM	Iya, ambil aja excelnya, nanti bikin dan identifikasi mana pra bencana, mana tanggap darurat mana pasca bencana trus dijumlahkan. Walau tidak akurat paling engga kita mengkonfirmasi bahwa di Nota keuangan ada indikasi anggaran bencana yang disiapkan ternyata memang betul ada begitu. Kalo mau coba tarik multiyear jadi bisa tahu turun naiknya.	
G	Kalo Sumber dana berarti semua ya?	
TM	Iya, kalo mau melihat semuanya gapapa digabung aja, kan itu masih dalam kerangka APBN, kalo dipisah pisah mesti banyak banget jadi kompleks, paling engga kan dapat datanya kan terus bisa ngidentifikasi outputnya.	
G	Kalo misal sudah dapat datanya bagaimana ya acara ideal untuk mengukur kinerjanya?	

TM	Idealnya ini nanti dibahas oleh BKF yang mengkoordinasikan, tapi sebenarnya DJA sebagai budget analis juga bisa sih bikin kaya dummynya dulu sebagai inovasi lah.	
G	Balik lagi kedepan mba, untuk pra bencana apa aja kira kira kegiatannya?	
TM	Di PP 28 ada itu, pra bencana itu ketika terjadi situasi tidak terjadi dan ada potensi terjadi. Bisa baca di PP 28 lengkap.	
G	Kalo tanggap darurat dan pasca bencana mungkin nanti tak baca di PP itu. Saya dapat data hibah Rehab Rekon Ke Pemerintah Daerah ini sebenarnya buat apa ya?	
TM	<b>Hibah untuk Rehab Rekon yang dikasih ke Daerah, melalui dana transfer daerah mulai tahun 2022, pertimbangannya daerah lebih mengetahui kebutuhan mana yg dapat diprioritaskan dulu untuk di benahi.</b> Misal ya bangun jembatan, rumah korban bencana, fasilitas-fasilitas lainnya terkait kebutuhan masyarakat. Untuk ini coba diskusi aja sama yang pernah di BA-BUN.	TM-11  TM-12
G	Sewaktu mba kemarin melakukan koordinasi dengan Bappenas dan BNPB apakah ada data yang dipegang sementara ini terkait bencana?	
TM	Sepertinya ada datanya, bentar ya. Kayaknya bappenas dan BNPB pernah memetakan ini, waktu itu <b>pendekatannya dengan melihat usulan dari aplikasi KRISNA. Hasil pemetaan berdasarkan aplikasi Krisna Bappenas, pada Tahun 2017 ada 25 kementerian/Lembaga yang memiliki program/kegiatan yang berkaitan dengan penanggulangan bencana dengan nilai sebesar Rp11,198 triliun. Hasil pemetaan tahun 2018 terdapat 26 kementerian/lembaga yang memiliki program/kegiatan yang berkaitan dengan penanggulangan bencana dengan nilai sebesar Rp9,301 triliun. Hasil pemetaan tahun 2019 ada 27 kementerian/lembaga yang memiliki program/kegiatan yang berkaitan dengan penanggulangan bencana dengan nilai sebesar Rp12,42 triliun.</b>  <b>Trus kalo pemetaan BNPB di dalam FGD kalo ga salah waktu itu, Tahun 2015 anggaran penanggulangan bencana sebesar Rp15,29 triliun, Tahun 2016 anggaran penanggulangan bencana sebesar Rp19,86 triliun, dan Tahun 2017 anggaran penanggulangan bencana sebesar Rp53,67 triliun.</b> Untuk pasca RSPP di tahun 2020 sepertinya belum ada data terbaru.	TM-13  TM-14
G	Kok bisa beda beda begitu ya besarnya?	

TM	Kalo BNPB itu pakanya metode pendekatan <i>one on one meeting</i> ke K/L nya yang punya anggaran bencana. Secara regulasi kan BNPB yang mengarahkan.	
G	DJA sendiri yang belum bisa ngidentifikasi ya?	
TM	Ya itu tadi, coba ditarik data bi, pake metode identifikasi anggaran langsung ke sumbernya untuk data pasca RSPP. Eh tapi dulu pernah dihitung deh... sebentar Ini ada data tahun 2022 tersebar di 15 K/L hanya sebesar Rp6,93 triliun. Anggaran terbesar terdapat di Kementerian PUPR dengan nilai sebesar Rp3,3 triliun diikuti BNPB dengan anggaran sebesar RP2,3 triliun. Pendekatan yang dilakukan dengan melihat nomenklatur yang terdapat di KRO yang menggunakan istilah “bencana”.	
G	Nha semakin kecil angkanya kalo cuma mengandalkan KRO. Nanti coba saya identifikasi. Lanjut untuk prabencana sendiri, apa yang kira2 jadi <i>concern</i> mba yang didanai anggarannya	
TM	Nha semangat mas, mestinya lebih besar dari itu paling engga mendekati, trus nanti coba dipikirin bagaimana supaya deviasi ini ga terjadi... Prabencana ya, kalo BNPB sendiri untuk mendanai biasanya pelatihan-pelatihan penanggulangan bencana sampai gladi resik, terus ada kebijakan, kebijakan yang disusun, mereka juga memfasilitasi terkait pendampingan pemerintah daerah, baik pada pra sampai pasca, ini untuk daerah yang kena bencana ya, sampai rehab rekon masih didampingi dan diberikan bantuan walaupun tidak semua dari APBN, kalo K/L lainnya mungkin kurang lebih sama ya, bisa memberikan bimtek terkait kondisi social seperti dulu di LIPI jadi masyarakat tahu apa yang akan dilakukan, kemudian membangun sistem peringatan dini... intinya ya itu tadi membangun masyarakat, sarana seperti sistem, dan prasarana seperti infrastruktur untuk mengantisipasi adanya bencana, terutama di daerah daerah yang termasuk zona rawan bencana yang datanya ada di IRBI itu. Kurang lebih seperti itu...	
G	Kalo tanggap darurat mungkin saya sudah ada gambaran sedikit dari dokumen-dokumen, kalo dari kaca mata mba T apa aja kira kira, untuk ngecek pemahaman agar selaras.	
TM	Tanggap darurat berarti dari kondisi darurat ya, jadi yang dilakukan kurang lebih kegiatan-kegiatan tentang penanganan ketika terjadi bencana, macam-macam bukan hanya pencarian korban saja, jadi anggaran kita sampai memikirkan bagaimana bantuan-bantuan itu bisa sampai, termasuk pemberian bantuan itu sendiri, sehingga nanti bisa tepat sasaran untuk para korban, kemudian tindakan SAR oleh basarnas, termasuk pengerahan	

	alat alatnya kan membutuhkan dana on call itu ya, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dengan Kemensos di tenda darurat juga termasuk. Coba mas identifikasi lagi melalui rencana aksi tadi kan sudah lengkap, nanti tinggal diskusi lagi ini masuk pra, tanggap atau pasca, bisa diskusi lagi.	
G	Baik coba saya identifikasi dulu	



**POLITEKNIK  
STIA LAN  
JAKARTA**

**Transkripsi Wawancara dengan Analis Anggaran Ahli Muda  
Direktorat Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan kebudayaan**

Hari, tanggal : Kamis, 14 September 2023  
 Lokasi : Lantai 7 Gedung Sutikno Slamet  
 Durasi : 00:30:21  
 Pewawancara : G  
 Partisipan : RS

Ket	Transkrip Wawancara	Ref
G	Mas jin ngobrol-ngobrol terkait anggaran ya mas	
RS	<i>Koyone berat iki seng ditakonke</i>	
G	Mboten pakdhe, seputar anggaran berbasis kinerja dan RSPP aja	
RS	<i>Lha seng ditakonke ki opo jane</i>	
G	Langsung aja yo... Bagaimana sih Kementerian/Lembaga itu mengalokasikan anggaran, dalam hal ini sebenere mengerucut ke anggaran bencana pakde...	
RS	Ya mengalokasikan anggaran itu <i>lak yo</i> ikut siklus perencanaan dan penganggaran sesuai jadwal yang ditetapkan. Kalo di DJA mulai menyusun reviu <i>baseline</i> berdasarkan inputan kinerja tahun lalu, mulai seko operasional terus ke non operasional, kemudian dihitung berapa sih kebutuhannya, mulai dari belanja pegawai, biasane sih pake <i>acress</i> sama faktor pengurang dan penambah, bisa CPNS atau ngitung yang pension berapa, kemudian belanja barang dihitung yang operasional berapa dengan lihat akun akun belanja barang operasional, kemudian disesuaikan dengan dokumen yang dikirim K/L barangkali ada kebutuhan yang memang perlu diperhitungkan, sampai nanti muncul pagu indikatif, bappenas berperan juga untuk ngawal program prioritas, njuk kita merujuk program prioritas itu untuk diberikan masukan bagaimana terkait capaiannya pada forum TM begitu seterusnya sampai keluar pagu indikatif sebagai ancar-ancar yang kemudian RKA-K/L disusun disini <i>sakteruse</i> sampe Pagu Anggaran dan Pagu Alokasi anggaran. <i>Sampeyan</i> coba baca aja PMK 62 yang baru terbit kemarin, disitu katanya omnibus PMK wis mencakup semua termasuk akuntansinya.	
G	Mungkin fokus dulu disini pakde, bagaimana intervensi pemerintah ya terkait <i>money follows program</i> ini, apa sudah berjalan atau belum?	
RS	Sebenere kan konsep <i>money follow program</i> ini arahane presiden to buat menyelaraskan penyusunan APBN. Waktu itu seingetku arahane penjabaran visi dan misi presiden terkait sumber daya, infrastruktur, regulasi yang dibuat simple dan	

	<p>transformasi ekonomi. Sebenere kan lahirnya UU 17 itu sudah menandakan to adanya reformasi penganggaran kaya sistem nya waktunya dibuat satu tahun sama penerapan penganggaran berbasis kinerja. Hingga sampai saat ini yaa masih ditemukan kekurangan to hingga singkatnya lahir proses penganggaran yang di redesain ulang untuk selanjutnya diperkuat dengan kebijakan kebijakan <i>money follow program</i> yang harapannya sebenere yo ngurangin tumpang tindih tadi supaya integrasi antara belanja pemerintah pusat dan daerah semakin bagus.</p>	
G	<p>Sebenere saya mau nanya kaitan kebijakan RSPP, <i>money follows program</i> itu kaitannya apa ya kan saya mau coba bikin inovasi ide ini bagaimana sih kalo anggaran tematik itu di bikin suatu informasi kinerja yang harapannya nanti ya itu tadi bisa memperkuat link RSPP dengan kebijakan <i>money follows program</i>.</p>	
AR	<p><i>Money follows program</i> itu kan sebenarnya di tataran strategis to mas, jadi memang pemerintah itu sudah mencanangkan program-program prioritas entah bungkusnya apapun itu bisa nawacita, prioritas presiden melalui proyek-proyek prioritas, nha hal ini kan nantinya dikerjakan secara bersama-sama kan begitu ya, beberapa K/L bekerja sama, misal saya dapat bagian yang mana gitu... ini kan singkatnya perwujudan <i>money follows program</i>, jadi memang dikerjakan secara bersama sama namun dalam koridor aturan kan begitu. Kalo misal pendanaannya dari APBN tentunya nanti kan harus pakai pedoman RSPP dan PBK ya, jelas <i>breakdownnya</i> apa, siapa mengerjakan apa, ini harus jelas dulu. Seringkali kan memang di kita terjadinya duplikasi katakan, salah satunya karena koordinasi <i>money follows program</i> itu ga berjalan dengan maksimal. Sebagai contoh bappenas yang memang pusatnya dalam melihat pembangunan apa yang prioritas juga masih belum maksimal dalam membagi peran kepada K/L K/L, ini kan memang kelemahan di kita gitu ya. Nha kalo anggaran tematik ini memang biasanya untuk menyusun nota keuangan, berapa sih pagu tema apa begitu, sehingga mudah di klasifikasikan. Lha sebenere jadi mau menyusun prototipe anggaran bencana?</p>	
G	<p>Ya jadi, makanya itu ini saya menggali lebih jauh ke njenengan supaya ada gambaran apa aja yang diperlukan kalo misal abid ini nyusun anggaran tematik, kaya pendidikan infrastruktur itu.</p>	

RS	<p>Terkait anggaran bencana ya, mungkin nanti coba main ke tempat mba T atau bu E, karena mitranya kan disana, jadi sepengetahuan saya memang seharusnya anggaran yang dialokasikan di banyak K/L itu, DJA harus punya pegangan pakem, kriteria apa gitu ya yang bisa sebagai pedoman buat control atau dalam artian mewujudkan yang katanya belanja berkualitas gitu ya. Jadi kalo sekedar menghimpun berapa besarnya dengan narasi Nota Keuangan yang masih sangat global ya memang kurang gigit sih. Sementara sekarang abid dituntut jadi budget analis, jadi mestinya instrument itu dibangun misal anggaran tematik, ya kita mesti punya pola, tapi ya dibangun dengan aturan yang berlaku gitu, jangan njuk semua semua ngaku saya ikut prioritas ini, saya tematik ini. Nha kalo anggaran tematik bencana ini kan luas ya, bayangin aja BNPB itu punya dana on call yang bisa di top up sewaktu-waktu, belum lagi di K/L yang njenengan share itu kan beberapa sudah berindikasi memang ada alokasi anggaran bencana tapi memang sesuai tusunya jadi informasi kinerjanya merujuk atasnya. Kita sebagai CFO kan sebenarnya bisa ambil informasi ini sebagai bahan buat yang diatas atas kan ya buat ambil keputusan. Kita sebagai JF kalo punya instrument itu kan ya nilai lebih supaya lebih tajam analisisnya gitu.</p>	
G	Jadi sepakat ni pakde ceritanya ada anggaran tematik bencana?	
RS	Ya kalo berfikir strategis haruse instrumen itu ada, supaya mudah juga, ketika ada permintaan data, ya kita tinggal Tarik aja ga usah lagi repot di excel filter sana sini.	
G	Menurut <i>njenengan</i> kira kira, untuk mbangun anggaran tematik ini apa dulu yang dilakukan pakde?	
RS	Mestine kudu identifikasi dulu ya, mana mana anggaran yang terkait bencana, baca aturan dulu selengkapnya terus cek dengan data yang kita punya, misale cek dari KRO dulu sepertinya ada yang sudah ada nomenklatur bencananya, terus kalo memang ga masuk disitu masuk ke RO mana saja bisa coba dicari, saya kemarin diberi dokumen renas PB sama mba T nanti bisa dipake rujukan itu, soalnya sudah disepakati nasional mana K/L yang terlibat dan terlibat dalam hal apa. Tinggal nanti sampeyan dudukkan lah posisi mereka dimana, mungkin bener obrolan kemarin bisa coba dimunculkan logic modelnya seperti apa.	
G	Semua ya, termasuk indikatornya?	
RS	Idealnya iya, tapi minimal rumusnya dulu, kalo indikator itu kan sudah terkait angka ya, nanti biar urusannya Dit lain itu, di kita yang penting gambaran besarnya ketemu, dibangun dengan asumsi yang jelas utamanya aturan kan.	



G	Terus bagaimanakah metode mengidentifikasi anggaran bencana yang sudah dialokasikan pada RKA-K/L/DIPA Kementerian Lembaga?	
RS	Ya itu tadi lihat outputnya, tapi sebenarnya kalo masih lihat output ini kan menandakan KRO yang selama ini ada belum bisa mewadahi semua intervensi pemerintah karena adanya RSPP ini.	
G	Solusinya gimana ya pakde menurut <i>njenengan</i>	
RS	Sebenere ini ranah pimpinan tapi lak menurut saya ya pakai tagging saja di akunnya, jadi jelas apa mendukung siapa, berapa alokasi, sumber dana juga akan kelihatan kan disana.	
G	Berarti kesimpulane tetep output/RO basis ya	
RS	Iya bener, karena produk yang dihasilkan K/L itu kan RO, ndak mungkin komponen ditagging kan, itu kan masih sebuah proses, jadi idealnya kalo memang mau melakukan tagging anggaran tematik bencana berarti tagging semua RO. Dasare itu tadi bisa RPJMN, RKP nya masing-masing K/L sama itu tadi Renas PB itu dokumen strategis untuk tema ini.	
G	Untuk outcome jangka pendek kira kira bagaimana menafsirkan itu?	
RS	<b>Ya dalam penganggaran jangka pendek dapat diidentifikasi dalam satu tahun anggaran</b> misalnya pada RKP kan disana penjabaran RPJMN, bisa dipake itu,	RS-1
G	Terkait itu satu lagi input yang kita diskusikan kemarin dalam logic model kira kira apa saja ya, apakah hanya anggaran saja, atau yang lainnya bisa?	
RS	Negara ini kan punya sumber daya, jadi bisa anggaran masuk kesana, personil, kemudian bahkan <b>BMN yang dimiliki oleh unit yang berkaitan langsung dengan bencana juga dapat sebagai input, kan pemeliharaannya telah dialokasikan oleh negara.</b>	RS-2
G	Nggih pun pakde nanti disambung kembali, coba tak identifikasi dulu datanya	
RS	Siap mengko ngobrol lagi yo ndak papa sekalian liat progressnya.	

**Transkripsi Wawancara dengan Perencana Muda  
Kementerian PPN/Bappenas**

Hari, tanggal : Jumat, 16 September 2023  
 Lokasi : *Zoom Meeting*  
 Durasi : 00:12:21  
 Pewawancara : G  
 Partisipan : AS

<b>Ket</b>	<b>Transkrip Wawancara</b>	<b>Ref</b>
G	Mas A, ijin diskusi terkait dengan bencana ya mas	
AS	Bencana opo mas?	
G	Terkait penanggulangan bencana maksude mas.	
AS	Oalah iyo mas, <i>sak ngertiku ya.</i>	
G	Dari sisi Bappenas sebagai mitra BNPB dan pengampu program dan kegiatan prioritas penanggulangan bencana, bagaimana bisa dilakukan indikasi pendanaan mas?	
AS	<b>Penanggulangan bencana itu kan sebenarnya suatu amanah undang-undang ya mas, seperangkat dengan aturan turunannya seperti PP, perpres yang tujuannya untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat, sehingga kebijakannya yang diatur dalam rencana pembangunan harus disesuaikan dengan kebijakan fiskal pemerintah di tempat sampeyan itu.</b>	AS-1
G	Kalo penanggulangan bencana itu polane disitu gimana mas dalam membagi kegiatane?	
AS	Penanggulangan bencana yo, sek bentar. Kami disini mengidentifikasi dengan mitra K/L yo berdasarkan usulan pas saat habis multilateral itu mas. Jadi di mitra kami hanya menilai itu saja berdasarkan mitra kami, walaupun nomenklaturnya tata ruang dan bencana, tapi kayane lintas sektornya belum maksimal.	
G	Jadi untuk data misalnya kegiatan apa yang dilaksanain di pra bencana, tanggap darurat dan pasca itu secara renja apa ada mas?	
AS	Kalo itu kayaknya BNPB yang lebih pas ya, di bagian kami itu hanya melihat secara proposal saja, mungkin kebijakannya ngikut kebijakan RIPB dan Renas yang sudah ditetapkan, lha tapi kalo K/L nya ngusuln kegiatannya, kalo enggak ya kami juga sifatnya hanya mengkoordinasikan, menilai perencanaan aja. Seringkali K/L nya nganggap oh ini kegiatane ga prioritas, ini prioritas. Kecuali yang PN-PN ya mestinya sudah ada data dan outputnya apa.	

G	Trus untuk anggarannya?	
AS	Di kami kan cuma indikasi pendanaan tok mas, kalo anggaran kan ditembate sampeyan. Tapi memang isu multisector ini memang sulit yo gimana mengidentifikasikannya. Kalo unit kami diminta ya butuh waktu juga mas soalnya nyebar kemana mana.	
G	Saya dapat data dari teman mas, katanya dari hasil FGD seperti ini. Hasil pemetaan berdasarkan aplikasi Krisna Bappenas, pada Tahun 2017 ada 25 kementerian/Lembaga yang memiliki program/kegiatan yang berkaitan dengan penanggulangan bencana dengan nilai sebesar Rp11,198 triliun. Hasil pemetaan tahun 2018 terdapat 26 kementerian/lembaga yang memiliki program/kegiatan yang berkaitan dengan penanggulangan bencana dengan nilai sebesar Rp9,301 triliun. Hasil pemetaan tahun 2019 ada 27 kementerian/lembaga yang memiliki program/kegiatan yang berkaitan dengan penanggulangan bencana dengan nilai sebesar Rp12,42 triliun.	
AS	Iya sepertine pernah ada pembahasan itu tapi data terbarunya sepertine belum ada mas.	
G	Kalo dokumen perencanaan saya bisa lihat dimana mas terkait kegiatan-kegiatan itu?	
AS	Coba RPJMN yang terrinci itu dicek, terus Renas PB itu kan dokumen hasil kesepakatan bersama juga. Sebenarnya njenengan mau nyusun apa ini mas?	
G	Nyusun anggaran tematik mas, ngumpulin kegiatan-kegiatan mana yang pra, tanggap, sama pasca. Jadi nanti kalo dari RKA-K/L rencananya direkomendasikan menggunakan <i>tagging</i> . Mungkin gambaranne seperti itu.	
AS	RSPP mestinya ada KRO bencana ya mas tapi saya lihat itu belum lengkap, sementara kegiatan mereka itu mirip-mirip, jadinya ya sampai saat ini KRO bencana itu cuma ada 8 itu mas. Setahuku.	
G	Kalo ngusulin KRO baru itu mudah apa susah mas?	
AS	Ya sebenarnya bersurat saja sih kemudian dibahas, apalagi memang ada beberapa K/L yang mengusulkan, jadi mestinya lebih mudah untuk diidentifikasi. Sampai sekarang belum ada usulan lagi.	
G	Berarti kalo ada usulan baru tetap diakomodir?	
AS	Ya nanti dibahas dulu lintas sektor mas, apa perlu dimunculkan KRO baru, soalnya kemarin kan rame masalah satuan itu, ada yang pro ada yang kontra, satuan sejenis tidak sejenis. Tempat <i>sampeyan</i> aja pemahaman RSPP dengan tempat kami juga agak beda kan, contohe komponen. Di PMK komponen opsional,	

	kalo di kami guna untuk monev nanti. Soalnya komponen itu kan memang tahapan.	
G	Oh ya bener mas. Nggih mas sementara cukup informasinya, nanti saya hubungi kembali apabila ada yang masih kurang jelas. Suwun.	



POLITEKNIK  
STIA LAN  
JAKARTA  
JAKARTA

**Transkripsi Wawancara dengan Analis Anggaran Ahli Muda  
Direktorat Sistem Penganggaran**

Hari, tanggal : Jumat, 15 September 2023  
 Lokasi : Lantai 7 Gedung Sutikno Slamet  
 Durasi : 00:15:58  
 Pewawancara : G  
 Partisipan : RIR

Ket	Transkrip Wawancara	Ref
G	Mas A, izin diskusi tentang informasi kinerja penganggaran ya mas.	
RIR	Baik mas.	
G	Mau menggali informasi, disini itu sebagai pengampu yang melakukan reviu kinerja penganggaran, kira kira, bisa dijelaskan nggak mas apa dalam melakukan reviu itu model logika itu dipakai mas?	
RIR	Maksudnya <i>logic model</i> mas? <i>Logic model</i> kan sebenarnya alat bantu dalam melakukan penyesuaian informasi kinerja ya mas. Jadi semestinya di tempat mas nih yang tempat awal menyusun informasi kinerja dengan bappenas, seharusnya <i>tools</i> itu dipakai ketika awal-awal <i>trilateral meeting</i> dengan lembaga.	
G	Baik, maksud saya yang lebih spesifik itu yang untuk anggaran tematik, apakah perlu dibuatkan instrument kinerjanya? Misal begini Direktorat PAPBN kan sering tuh nanyakan data terkait infrastruktur, nah cara mengukur dan mengevaluasinya seperti apa, masa iya hanya pakai realisasi aja?	
RIR	Jadi maksudnya mas mau bikin <i>logic model</i> seperti di PMK dulu ya, yang kami dulu inisiasi ke PMK juksunlah?	
G	Iya benar, maksud saya disini saya coba membuat model bagaimana sih cara memastikan tujuan dari anggaran tematik penanggulangan bencana itu tercapai.	
RIR	Yang saya ketahui sih anggaran tematik itu yang melakukan inisiasi adalah Dit PAPBN mas, cuma ya mitra K/L di abis harusnya bisa mengusulkan bagaimana caranya untuk melakukan standarisasi perhitungan anggarannya, termasuk ya alat informasi kinerjanya, seperti misal penanggulangan bencana, ini kemarin jadi isu disini kan ya, anggarannya menyebar terus setiap minggu sedengerku itu diminta data berapa sih anggaran bencana yang dialokasikan. Nah berhubung mitra kerja subdit abid tempatnya mas itu pengampunya, seharusnya memang membuat model inovasi begitu supaya mudah, jadi sebagai masukan juga untuk pimpinan, oo begini	

	<p>Iho instrumen yang bisa dibangun dengan <i>logic model</i> ini. Misal simbolis saja dulu Outcomenya apa, Kegiatannya apa, kemudian berapa anggaran yang dialokasikan di RO untuk melaksanakan kegiatan tersebut termasuk evaluasinya dalam jangka pendek menengah dan panjang terkait kinerja anggarannya.</p>	
G	<p>Kalo misalnya mau dibangun model seperti itu, kira kira datanya merujuk kemana?</p>	
RIR	<p>Mestinya ada dokumen yang menaungi ya mas, seperti RPJMN, terus dokumen teknis terkait. Mungkin dalam hal penanggulangan bencana bisa merujuk aturan BNPB, atau dokumen sejenis, jadi pengalokasiannya mempunyai dasar hukum.</p>	
G	<p>Lanjut ya, kemudian ini isu berbeda, di struktur penganggaran kita saya menemukan kalo KRO kebencanaan itu memang belum sepenuhnya bisa mawadahi barang/jasa yang dihasilkan dari anggaran terkait bencana apa. Menurut mas, apakah tagging anggaran bencana ini bisa dilakukan mengingat RSPP itu di aturannya tidak memerlukan tagging, tapi juga tidak mutlak tidak dibolehkan untuk ditagging.</p>	
RIR	<p>Mas ada datanya ya, ada 8 KRO ya. Jadi banyak RO yang belum bisa dimasukkan disini begitu. Untuk hal ini memang kebanyakan K/L ketika bertanya melalui help desk bisakah memunculkan KRO baru. Nha sebenarnya KRO itu kan adalah klasifikasi output ya, intervensi pemerintah terkait apa yang dilakukan dengan menghasilkan produk apa. Terkait kebencanaan memang ada opsi mas, bisa muncul KRO baru, seluruhnya diisikan kata bencana atau dilakukan tagging, tapi untuk beberapa KRO baru itu memang sebenarnya memang ada KRO umum yang dapat diacu, misalnya peraturan, kan ini bersifat umum ya, kalo memang ada nanti KRO yang bisa dimunculkan, bisa juga sebagai opsi mas, KRO itu kalo di logic model kan bisa disamakan dengan output juga. Tapi kalo tagging, memang dia sifatnya lebih spesifik sebenarnya, tagging itu merujuk langsung ke RO nya, tanpa melihat posisinya, nha tergantung nih mau melihat dari sisi mana, menurutku yang mudah saja digunakan, kalo memang terlalu banyak RO yang diluar KRO kebencanaan bisa digunakan tagging, tapi kalo dimungkinkan mau bikin KRO baru ya memang harus ada inisiasi dari K/L yang bersangkutan untuk mengusulkan dan kemudian dibahas.</p>	
G	<p>Kalo instrument anggaran tematik misal yang perubahan iklim itu apakah EKP ikut dalam melakukan evaluasi?</p>	

RIR	Ya sebenarnya kami dilibatkan, cuma sebatas melihat keterkaitan EKA dengan sasaran yang di K/L nya, jadi memang kami fokusnya di capaian-capaiannya, apakah terjadi anomali atau tidak.	
G	Trus dalam menyusun model informasi kinerja anggaran tematik ini apakah perlu memasukkan indikatornya dulu?	
RIR	Mungkin bisa dibentuk dulu mas polanya seperti apa, nanti kalo indikator kan ketika penguangan ke dokumen perencanaan dan penganggaran aja, toh anggarannya juga belum ada, cuma memetakan aja kan kegiatan dan outputnya dan sasaran yang akan dicapai.	
G	Untuk data yang bisa dipakai saat nyusun pagu dan realisasi pakai data yang mana, kan berubah-berubah tuh jadi pegangannya bagus yang mana.	
RIR	Menurutku mas pake pagu dipa awal, soalnya itu kan ketika APBN disahkan ya memang startnya dari DIPA awal, jadi ketika ada perubahan yaudah itu merupakan dinamika pelaksanaan dilapangan, nanti diambil feedbacknya paling realisasi dan capaiannya aja.	
G	Perbedaannya realisasi sakti dan realisasi RO apa? Lumayan juga deviasinya. Penting untuk nyusun dan analisis jumlah anggaran secara time series.	
RIR	Bedanya kalo sakti itu pas SPM diterbitkan, kalo RO itu ketika SP2D sudah diterbitkan. Bener mas deviasinya gede, untuk itu makanya sebagai patokan pakai pagu dipa awal saja. Nha ini kan bikin model ya jadi mungkin deviasi itu bahasan tersendiri nantinya mas. Gausah terlalu jauh, modelnya aja dulu	

**Transkripsi Wawancara dengan Analis Anggaran Ahli Muda  
Direktorat Abid PMK DJA**

Hari, tanggal : Kamis, 14 September 2023  
 Lokasi : Lantai 7 Gedung Sutikno Slamet  
 Durasi : 00:15:58  
 Pewawancara : G  
 Partisipan : MM

Ket	Transkrip Wawancara	Ref
G	Mas M, ijin diskusi tentang DSP mas.	
MM	Baik mas.	
G	Mau menggali informasi, untuk Dana Siap Pakai itu sebenarnya seperti apa mas?	
MM	Dana Siap Pakai itu peruntukannya untuk kegiatan tanggap darurat di kala terjadi bencana, memerlukan dana yang besar dan bersifat tidak dapat ditunda, pemerintah sudah mencadangkan itu dalam BA-BUN. Realisasi penggunaan DSP oleh BNPB sejak Tahun 2019 selalu melampaui pagu awal. Tahun 2019, pagu awal Dana Siap pakai sebesar Rp5 miliar, tapi realisasinya mencapai Rp7.564 miliar. Tahun 2021, pagu awal Dana Siap Pakai sebesar Rp250 miliar, realisasinya mencapai Rp3.886 miliar.	
G	Berarti termasuk perhatian pemerintah dalam penanggulangan bencana ya mas?	
MM	Iya benar, itu merupakan dukungan dan concern pemerintah terhadap penanganan bencana tentunya merupakan sesuatu yang memang sudah wajib dilakukan. Tapi APBN jumlahnya sangat terbatas dan tidak bisa berpersepsi bahwa berapapun kebutuhan dana tinggal diajukan, dan tentunya harus diimbangi dengan beberapa kondisi tata kelola yang baik.	
G	Pengelolaannya untuk di BA-BUN sendiri seperti apa gambaran dan kendalanya mas?	
MM	Ya memang harus ada proses perbaikan tatakelola DSP untuk keadaan darurat supaya bisa diperbaiki begitu, dampaknya ini kan ke kecepatan penanganan disatu sisi, disisi lain besarnya jumlah anggaran DSP berpotensi besar terjadinya kecurangan. Yang saya ketahui, beberapa penyebab yang ditemukan misalnya terjadi perbedaan penafsiran nomenklatur DSP. Kementerian Keuangan menafsirkan nomenklatur penggunaan DSP terbatas pada bencana alam. Sementara itu dalam tataran pelaksanaan anggaran, BNPB menggabungkan semua jenis bencana ke dalam DSP. Hal ini tentunya berdampak ya mulai	



	dari penggunaan akun sampai kepada kesulitan untuk memantau indikator kinerja output.	
G	Untuk dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi bisa dijelaskan itu termasuk transfer daerah? Apakah saya boleh minta datanya?	
MM	Dana RR itu merupakan dana hibah dari pemerintah pusat melalui TKD untuk pemerintah daerah. Karena sama-sama berasal dari APBN, maka seharusnya memiliki dasar kebijakan dan perencanaan yang selaras, terpadu, dan terkait untuk mencapai tujuan yang ditetapkan baik dalam RPJP maupun RPJMN termasuk Hibah Rekonstruksi Rehabilitasi (RR) ini seharusnya harus selaras ya dengan kebijakan pemerintah pusat karena termasuk siklus penanggulangan bencana. Terkait data silahkan, nanti akan saya carikan yang terkait data hibah RR yang sudah dilakukan transfer ke daerah.	



**Transkripsi Wawancara dengan Perencana Muda  
Badan Nasional Penanggulangan Bencana**

Hari, tanggal : Jumat, 16 September 2023  
 Lokasi : Lantai 7 Gedung Sutikno Slamet  
 Durasi : 00:22:58  
 Pewawancara : G  
 Partisipan : Y

Ket	Transkrip Wawancara	Ref
G	Assalamualaikum, pagi mas Y. Ijin diskusi terkait PB ya mas.	
Y	Walaikumussalam, tadi dapat info dari pak A, bapak mau ngobrol-ngobrol.	
G	Iya mas, mau mendalami kegiatan BNPB terkait PB mas. Bagaimana gambaran pelaksanaan penanggulangan bencana di Indonesia mas?	
Y	Sebenarnya kalo saya lihat, terkait penyelenggaraan PB ini prakteknya di Indonesia sudah lumayan maju mas. Tandanya itu adanya komitmen nasional, penguatan peran kelembagaan, kesiapsiagaan yang semakin meningkat dibarengi dengan komunitas dan kemitraan antar pihak dalam menghadapi risiko bencana. Hal ini diakui dunia internasional sebenarnya. Buktinya yaitu ketika ada status bencana nasional untuk bencana non-alam COVID pada akhir tahun 2019, ketika itu kan pandemic menyerang ke seluruh dunia termasuk di Indonesia, waktu itu kita menyusun renas PB ini mas, jadi momennya pas kondisi status darurat bencana nasional. Jadi momen itu ditemukan masalah-masalah pada saat penanganan darurat bencana, ditengah masalah itu kita melihatnya sebuah peluang untuk perbaikan sistem nasional. Waktu itu bapak presiden memberi arahan ke kepala BNPB untuk melakukan reformasi Reformasi (Penguatan) Sistem Ketahanan Bencana untuk dimutakhirkan. Jadi supaya bencana non alam skala nasional seperti covid ini tetap dapat diatasi namun bencana lain juga tetap ada ketahanan. Jadi tata kelola PB itu banyak berfokus pada regulasi, kelembagaan, dan tata kelola PB.	
G	Apa penanggulangan bencana yang dilaksanakan dirasa telah mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat?	
Y	Sangat berpengaruh... misalnya isu <i>climate change</i> kemudian dampaknya aja yang ringan ada bencana, itu saja sudah berpengaruh ke ketahanan nasional, misal sektor pangan terganggu dengan bencana kekeringan.	

G	Masalah apa yang muncul ketika pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana?	
Y	Mungkin saya sampaikan saja waktu itu kita mendapatkan pengarahan dari bapak kepala, bahwa masalah penanggulangan bencana itu menghadapi lima tantangan yaitu Indonesia risiko bencana yang terjadi cenderung meningkat, mungkin mas bisa akses datanya di data IRBI BNPB sudah kami publish juga... Kemudian kerentanan social karena bencana jadi bisa menghambat pembangunan. Selanjutnya kapabilitas dan kapasitas BNPB dan BPBD serta semua aktor juga masih menjadi isu. Yang terakhir yaitu budaya sadar bencana di masyarakat belum merata.	
G	Terkait budaya sadar bencana ini, BNPB sudah melakukan apa?	
Y	Sekarang ini sudah dilaksanakan sosialisasi seperti melalui program desa tangguh bencana, sandiwara radio RRI untuk masyarakat pelosok yang rawan bencana, pertunjukan tradisional, BNPB ke sekolah-sekolah untuk melakukan sosialisasi terkait PB.	
G	Terkait pendanaannya, apakah sudah mencukupi pak?	
Y	Kalo bicara pendanaan bencana utamanya APBN, ya saya rasa mencukupi, bisa ditarik dari DSP ketika adanya darurat, kemudian bisa dari Dana kontijensi, sudah disiapkan Menteri keuangan, Cuma memang prosedurnya ini perlu disederhanakan, sementara misal pada kasus DSP ini kan butuhnya cepat ya, sedangkan untuk akuntabilitas tetap harus melakukan pengusulan dengan berbagai dokumen, tapi ya memang seperti itu prosedurnya jadi menurut saya tidak masalah.	
G	Untuk dokumen Renas PB ini sendiri, apakah bisa diacu sebagai dokumen untuk penganggaran pak? Sementara di kami sebenarnya jika mengacu ke RPJMN memang masih sangat abstrak sekali.	
Y	Menurut saya bisa bapak, itu kan dokumen kebijakan agar terlihat peran stakeholders ya. Renas PB kan berlaku untuk unit pusat atau daerah, dan bahkan ada aktor pemerintah dan non pemerintah sebagai rujukan komitmen negara ini dalam perlindungan masyarakat. Konkrit dan riilnya sudah tertuang pada renas diantaranya menyediakan sumberdaya, langkah-langkah aksi penyelenggaraan penanggulangan bencana di tingkat pusat dan daerah sudah terintegrasi disana. <b>Renas juga dapat digunakan sebagai referensi, karena telah menghimpun berbagai dokumen yang akan diwujudkan dalam aksi nyata.</b>	Y-1

G	Berarti BNPB dalam mengalokasikan anggaran sudah menggunakan pendekatan money follows programs?	
Y	Untuk kegiatan tertentu iya, namun kegiatan internal sendiri masih berpatokan pada tugas dan fungsi masing-masing unit.	
G	Terkait penganggaran di BNPB, untuk tahap prabencana biasanya dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan apa?	
Y	Coba saya buka dokumen dulu ya mas, secara garis besar yaitu kegiatan pelatihan-pelatihan masyarakat guna meningkatkan kesiapsiagaan (pendidikan dan pelatihan teknis penanggulangan bencana, pelatihan kesiapsiagaan bencana, pelatihan teknis penanggulangan bencana untuk personil BNPB serta simulasinya di daerah, penyusunan kebijakan bidang ketahanan bencana dan perubahan iklim, penyusunan data dan informasi publik melalui sistem manajemen pengetahuan kebencanaan, fasilitasi pembinaan pemerintah desa bisa dalam penguatan desa tangguh bencana, fasilitasi penguatan ketangguhan masyarakat berbasis komunitas dan keluarga. Kurang lebih seperti itu...	
G	Selanjutnya untuk tahap tanggap darurat, mohon izin bapak?	
Y	<b>Pada tanggap darurat, biasanya terkait dengan ketika kegiatan itu terjadi, apa yang dibutuhkan untuk melakukan pertolongan kepada korban, bagaimana cara meminimalisasi korban.</b> Untuk penggunaan anggaran DIPA kita yang bukan dari DSP untuk bantuan-bantuan, pengarahan terkait bencana, kajian cepat, strategi dalam pemerataan logistik, untuk DSP sebagai pendampingan komando dan pengerahan sumber daya darurat dari pihak aparat dan basarnas, bantuan kebencanaan untuk darurat, kemudian ada juga yang buat menambah pendanaan untuk operasi darurat, penanganan korban dan pengungsi, penyelamatan dan evakuasi korban serta pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi, pemenuhan infrastruktur darurat. Kemudian rehabilitasi rekonstruksi kita berperan di fasilitasi dan pembinaan pemerintah daerah, koordinasi kebijakan yaitu misalnya melaksanakan kebijakan pemulihan dan peningkatan sosial ekonomi dan sumber daya alam pascabencana, pelayanan publik lainnya biasanya melakukan fasilitasi pemulihan dan peningkatan sosial ekonomi dan sumber daya alam pascabencana, layanan fasilitasi pemulihan dan peningkatan sosial ekonomi dan sumber daya alam pascabencana, perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.	Y-2
G	Terkait adanya kegiatan yang mirip dengan K/L lainnya menurut bapak apakah kegiatan tersebut merupakan duplikasi	

	atau memang dalam konsep kebencanaan hal itu adalah sesuatu yang dapat dilakukan?	
Y	Dalam konteks bencana, apalagi keadaan darurat, maka yang difokuskan adalah bagaimana supaya korban itu seminimal mungkin, apabila dilihat dari sisi finansial tentunya hal ini wajar ya, negara ini kan dibangun dari azas gotong royong. Namun dari sisi akuntansi memang akuntabilitas itu perlu, yang kami harapkan sebenarnya yaitu tetap komprehensif dan terintegrasi kemudian saling melengkapi sehingga pendanaan PB itu bisa maksimal, mungkin begitu mas,	



POLITEKNIK  
STIA LAN  
JAKARTA

**Transkripsi Wawancara dengan Penelaah DJA dan Stakeholders  
Kementerian/Lembaga**

Hari, tanggal : Jumat, 12 September 2023  
 Lokasi : Lantai 7 Gedung Sutikno Slamet, *Whatsapp*  
 Durasi : 00:15:58  
 Pewawancara : G  
 Partisipan : F, SBP, GCP, MNR

Ket	Transkrip Wawancara	Ref
G	Ijin diskusi terkait alokasi anggaran di Kementerian PUPR ya mas. Ini mas, untuk mitra mas di PUPR itu kan saya dengar dari bapak AR pembangunan infrastruktur itu ada kaitannya dengan bencana, terkait mitigasi, tanggap darurat alokasi anggarannya untuk apa ya mas?	
F	Sebentar saya cek data RKAKL dulu, seingetku <b>alokasi pada PUPR termasuk upaya mitigasi bencana utamanya pada RO infrastruktur drainase, DAM, pengaman pantai, bendungan</b> konkritnya itu mungkin RO nya ya, pembangunan infrastruktur pembangunan drainase, Sabo DAM, Pengaman Pantai, Pengendali Banjir, Bendungan sebanyak 28 Bendungan di berbagai wilayah Indonesia diantaranya Bendungan Cibeet, Cijurey, Mbay, Keureuto, Rukoh, Lau Simeme, Sepaku Semoi, Cipanas, itu kegiatannya lintas tahun. Coba aja cek datanya di bi kurang lebih seperti itu.	F-1
G	Ijin diskusi terkait alokasi anggaran di Kementerian Sosial ya mas. Ini mas, untuk mitra mas di Kemensos itu kan saya dengar dari bapak AR tanggap darurat alokasi anggarannya untuk apa ya mas?	
SBP	Sek bentar tak ceknya, ini maksudnya buat triangulasi ya... sebenarnya alokasinya itu terkait bantuan ke korban ya riilnya pemenuhan kebutuhan dasar kebutuhan dasar kalo konkrit outputnya layanan dukungan psikososial dan reintegrasi sosial, dan korban bencana alam yang mendapatkan bantuan logistik tanggap darurat. Jumlahnya njenengan cari sendiri di bi, kan di <i>open</i> datanya. Untuk yang 2023 itu untuk kelanjutan bantuan social covid mas dialokasikan di DIPA.	
G	Ijin ibu, saya ingin <i>crosscheck</i> data, saya coba menyusun anggaran tematik, mungkin sederhananya seperti bagan ini, mohon tanggapan itu bagaimana peran Kemenkop UKM pada bagan tersebut?	

GCP	Baik pak, sebentar saya pelajari <b>pada dokumen RKA-K/L kami, anggaran tersebut tertuang pada tahap rehabilitasi untuk UMKM, dengan memberikan bantuan. Menurut kami peta tersebut telah mewakili apa tujuan dari anggaran tematik tersebut, hingga hal detil dapat tergambar posisinya dimana, memang kami focus sesuai tusi kami membantu UMKM pak.</b>	GCP-1
G	Ijin mas, saya coba menyusun model anggaran tematik mas, menurut identifikasi data saya, K/L RRI mengalokasikan anggaran tersebut, mohon coba dipelajari bagan tersebut, apakah posisi RRI tergambar dalam tematik tersebut?	
Y	<b>Model tersebut sudah mewakili, kami berperan di sistem peringatan dini melalui siaran kepada masyarakat terkait informasi kebencanaan.</b> Untuk RO nya 5145 QMA 003 Program Produksi Siaran Tanggap Bencana Prioritas Nasional 5146 QMA 003 Produksi Siaran Tanggap Bencana Prioritas Nasional.	MNR-2

**POLITEKNIK**  
**STIA LAN**  
**JAKARTA**

## LAMPIRAN V

### Proses Coding Partisipan AR

Ket	Transkrip Wawancara	Ref	Inti Informasi	Subtema	Tema
AR	Kalau masnya mau lihat anggaran tematik ya mas. Sepertinya itu belum ada di klaster tematik kita ya. <b>Anggaran bencana di APBN itu ya sebenarnya dialokasikan di K/L sesuai dengan aturan yang berlaku gitu lho, dalam pengalokasian anggaran harus ada dasar hukumnya kan. supaya bisa didanai APBN.</b> Jadi sebenarnya anggaran tematik bencana ini ya harusnya dibangun dari bagaimana sih dasar hukum yang ada dan berlaku. Coba masnya baca Undang-Undang 24 Tahun 2008, PP 21 tahun 2008, PP 22 tahun 2008 seingat saya beberapa peraturan itu yang mendasari adanya program penanggulangan bencana	AR-1	Dasar Pembebanan Belanja APBN	Program Penanggulangan Bencana dan Pendanaan dari APBN	Pengalokasian Anggaran Penanggulangan Bencana
AR	<b>Lho ya kalo K/L mengalokasikan anggaran itu dasarnya ya peraturan to, mau itu undang-undang, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, kemudian tinggal ditelaah urgensi dan keterkaitannya dengan prioritas pemerintah...”</b>	AR-2	Dasar Pembebanan Belanja APBN	Program Penanggulangan Bencana dan Pendanaan dari APBN	Pengalokasian Anggaran Penanggulangan Bencana
AR	<b>Tujuan penerapan RSPP ya itu tadi, menjamin belanja yang dialokasikan berkualitas, artinya sesuai antara apa yang dikeluarkan oleh negara dengan manfaat yang di dapat,</b> kalo anggaran tematik kan mengelompokkan dengan tema tema tertentu, misalnya stunting, kesehatan, pendidikan. Mas coba	AR-3	Tujuan Penerapan RSPP	Analisis Alokasi Anggaran Penanggulangan Bencana pasca RSPP	Pengalokasian Anggaran Penanggulangan Bencana





AR	<b>Masalah klasik dalam penganggaran kita yaa itu tadi, sulitnya mengkoordinasikan supaya menghindari tumpang tindih pengalokasian anggaran dalam kegiatan karena berbagai K/L sejatinya melakukan kegiatan yang sama.</b>	AR-7	Masalah duplikasi dalam penganggaran	Analisis Alokasi Anggaran Penanggulangan Bencana pasca RSPP	Pengalokasian Anggaran Penanggulangan Bencana
AR	<b>Solusinya dari duplikasi ini ya itu tadi kembali ke tugas pokok dan fungsi masing-masing K/L dengan koordinasi yang dipimpin oleh BPNB.</b>	AR-8	Solusi masalah duplikasi dalam penganggaran	Analisis Alokasi Anggaran Penanggulangan Bencana pasca RSPP	Pengalokasian Anggaran Penanggulangan Bencana
AR	Program penanggulangan bencana itu ya pelaksanaannya lintas mas, tapi secara penganggaran itu kan tersebar. Program lintas itu misalnya <b>program teknis ada yang lintas lembaga, seperti program riset dan inovasi yang ada di BRIN dan BAPETEN</b> , bukannya mas pernah bermitra juga dengan mereka ya?	AR-9	Program Lintas Lembaga	Analisis Alokasi Anggaran Penanggulangan Bencana pasca RSPP	Pengalokasian Anggaran Penanggulangan Bencana
AR	<b>yaa program lintas ini belum efektif ya, sehingga potensi duplikasi masih ada.</b> Program lintas itu sebenarnya ya keseluruhan <i>puzzle</i> dalam lingkup <i>money follows program</i> , namun kenyataannya karena kebanyakan atribut jadi mengesankan struktur anggaran kita ini tidak simple, ada nawacita, ada janji presiden, ada prioritas nasional, nah ini memang bagi mereka yang awam malah bikin bingung... Sementara program-program itu juga sekarang lagi digalakkan supaya ke masyarakatnya itu kena dampak yang bagus, artinya berdampak langsung, jadi belum	AR-10	Program Lintas Lembaga	Analisis Alokasi Anggaran Penanggulangan Bencana pasca RSPP	Pengalokasian Anggaran Penanggulangan Bencana

	tentuk misal program riset inovasi yang di BRIN tadi merupakan program yang dipahami masyarakat. Masyarakat <i>kan</i> taunya Cuma program pemerintah misal a b dan c, tp itu merupakan bagian kecil dari program yang itu tadi, yang secara tusi ke lembaga dan secara tematik-tematik tadi.				
AR	Nha tadi bicara tematik... <b>tagging Anggaran Tematik Bencana ini baru dalam tahap rekomendasi program <i>secondment</i> Kementerian Keuangan, <i>existing</i> telah berjalan penandaan secara KRO, sudah ada rumahnya walau tidak semua anggaran bencana masuk kesitu.</b>	AR-11	Pentingnya anggaran tematik bencana	Analisis Alokasi Anggaran Penanggulangan Bencana pasca RSPP	Pengalokasian Anggaran Penanggulangan Bencana
AR	“Yaa... memang seharusnya dituangkan dalam lingkup anggaran tematik penanggulangan bencana supaya terintegratif dan mudah untuk di <i>tracing</i> ketika ada aspek yang tidak berjalan sesuai perencanaan...”	AR-12	Fungsi anggaran tematik	Anggaran Tematik Bencana melalui Penandaan (Tagging)	Model Informasi Kinerja Anggaran Tematik Bencana
AR	<b>Pengalokasian anggaran pada Kementerian Lembaga untuk suatu tema tertentu misal kita bicaranya anggaran bencana itu dipengaruhi kebutuhan yang utama kemudian target, serta jumlah pagu nya dari proses <i>top down</i>.</b>	AR-13	Definisi Anggaran Tematik	Analisis Alokasi Anggaran Penanggulangan Bencana pasca RSPP	Pengalokasian Anggaran Penanggulangan Bencana
AR	<b>Siklusnya mengikuti siklus penganggaran mas. Untuk menyusun anggaran tematik diperlukan tagging di level RO mas. <i>Tagging</i> itu diberikan ketika pembahasan pagu anggaran, setelah pagu indikatif. RKA-KL</b>	AR-14	Penandaan dalam siklus penganggaran	Proses Penandaan Anggaran Tematik dan Penuangan Informasi Kinerja pada	Model Informasi Kinerja Anggaran Tematik Bencana

<p>itu mulai ada dan disusun kan ketika pagu anggaran ya mas. Jadi disitu bisa mulai dilakukan tagging anggarannya misal terkait bencana ini yang mas inisiasi, atau anggaran pendidikan yang juga sama konteks nya menyebar di dalam RKA-K/L berbagai kementerian, seperti Kemdikbudristek, Kemenag, dan Kementerian yang punya PTKL, seperti STIA LAN sekolah mas itu kan juga PTKL yang mungkin mengelola PNBP ya atau BLU... Jadi seperti itu ya gambarannya kira kira mas. Ini juga berpengaruh dengan <b>Penyusunan anggaran sesuai siklus, kan kelihatan ya merupakan gabungan antara <i>bottom up</i> dan <i>top down</i></b>, jadi seperti yang kita laksanakan sehari hari, menyusun RKA-K/L dengan <i>schedule</i> yang sudah ditetapkan sesuai pagu, oleh unit satker yang bersangkutan. Nanti setelah ini coba mas cari referensi terkait anggaran tematik yang lainnya, sepertinya sudah ada panduannya disusun sama teman-teman BKF.</p>	AR-15	Proses penganggaran	<p>Dokumen Anggaran</p> <p>Analisis Alokasi Anggaran Penanggulangan Bencana pasca RSPP</p>	<p>Pengalokasian Anggaran Penanggulangan Bencana</p>
<p>AR <b><i>Bottom up</i></b> berarti satker menyusun output apa yang akan dihasilkan, dengan batasan anggaran yg ditentukan secara <b><i>top down</i></b> dari level pimpinan tertinggi. Jadi tetap menggabungkan antara kebijakan dan kebutuhan. Kalo dibilang kebutuhan anggaran, mestinya semua ya seringkali bilang kurang ya mas. Balik ke konteks anggaran bencana, ini agak beda mas, nanti coba hubungi mba T untuk lebih</p>	AR-16	Proses penganggaran	<p>Analisis Alokasi Anggaran Penanggulangan Bencana pasca RSPP</p>	<p>Pengalokasian Anggaran Penanggulangan Bencana</p>

	detilnya, karena beliau lebih mengerti RKA-K/L terbaru dibandingkan saya, bisa juga ke bu E, nanti diskusi aja. Idenya bagus ini mas siapa tahu bisa menjadi inovasi Dit PMK kan kalo ditulis sebagai penelitian...				
AR	Waktu itu saya juga dapat penugasan untuk kompilasi, seingat saya memang iya bahwa <b>kenaikan anggaran bencana pada tahun 2020 tentunya untuk tanggap darurat penanganan COVID-19 yang angkanya melonjak waktu itu</b> , seiring dengan penetapan dari Satgas COVID 19.	AR-17	Alasan Anggaran bencana melonjak tahun 2020	Analisis Alokasi Anggaran Penanggulangan Bencana pasca RSPP	Pengalokasian Anggaran Penanggulangan Bencana

### Proses Coding Partisipan TM

Ket	Transkrip Wawancara	Ref	Inti Informasi	Subtema	Tema
TM	Wah berat nih sepertinya, saya coba jawab dengan yang saya tahu ya. Penanggulangan bencana kan memang suatu yang kompleks ya... Cuma setahu saya begini <b>Kalo bicara anggaran penanggulangan bencana, ndak bisa cuma lihat BPNB, kan masnya sudah tahu toh kalo money follow program itu keroyokan gitu melaksanakannya, tapi ya seharusnya ndak lepas dari tusi.</b>	TM-1	Anggaran Penanggulangan Bencana	Analisis Alokasi Anggaran Penanggulangan Bencana pasca RSPP	Pengalokasian Anggaran Penanggulangan Bencana
TM	RSPP sih sebenarnya sejak diimplementasikan sudah banyak kan ya KRO bencana yang ada buat nampung anggaran bencana, jadi sebenarnya memang itu baru potongan kecil saja. Belum bisa mewedahi semua anggaran bencana itu sendiri. <b>“tidak</b>	TM-2	KRO Kebencanaan	Kendala/Gap dalam Pengalokasian Anggaran Penanggulangan Bencana sesuai RSPP	Pengalokasian Anggaran Penanggulangan Bencana

	semua anggaran bencana itu masuk ke KRO kebencanaan mas, banyak yang belum sesuai, K/L cenderung melihat dari kegiatannya apa, bukan muatan untuk mendukung kebencanaan itu”				
TM	Iya terkait <b>tagging Anggaran Tematik Bencana</b> ini baru dalam tahap rekomendasi program <b>secondment Kementerian Keuangan</b> , existing telah berjalan penandaan secara KRO, sudah ada rumahnya walau tidak semua anggaran bencana masuk kesitu. Sampai saat ini belum ada tagging, masalahnya belum ada inisiasi dari kita ya untuk tindak lanjut ini.	TM-3	Perlunya Penandaan Anggaran Penanggulangan Bencana pada RKA-K/L	Analisis Alokasi Anggaran Penanggulangan Bencana pasca RSPP	Pengalokasian Anggaran Penanggulangan Bencana
TM	<b>Anggaran tematik itu buat rekomendasi menyusun kebijakan fiskal, jadi pemerintah nantinya bisa melihat perlu dana segini lho untuk tema ini...</b> anggaran tematik kan memang di tagging buat tahu isinya apa, besaran anggarannya berapa, langsung menjaring di RO mana, walaupun bukan KRO kebencanaan.	TM-4	Fungsi anggaran tematik	Anggaran Tematik Bencana melalui Penandaan (Tagging)	Model Informasi Kinerja Anggaran Tematik Bencana
TM	Iya, dengan proses tagging di RO, ya <b>untuk melihat anggaran bencana secara riil berapa dialokasikan, masnya tentunya bisa melihat pada level RO toh, kan disitu sudah ada besaran anggaran.</b> Kalo di KRO kan dia masih nyampur tuh, sulit identifikasi besarannya jadinya.	TM-5	RO basis dalam identifikasi anggaran bencana	Analisis Alokasi Anggaran Penanggulangan Bencana pasca RSPP	Pengalokasian Anggaran Penanggulangan Bencana

TM	<p>Penanggulangan bencana kan sudah ada cadangan dana ya di BA-BUN dana siap pakai dan dana kontingensi. <b>Dana Kontijensi, dialokasikan pada DIPA BNPB, langsung drop dari BA-BUN. Jadi Dana kontijensi itu adanya di DIPA BNPB, DSP itu adanya BA-BUN untuk berjaga-jaga kalo kondisi darurat...</b></p> <p>Selain dana kontijensi, dana siap pakai, sebenarnya banyak K/L yang memakai KRO bencana dalam pengalokasian pendanaan bencana serta kegiatan yang terkait peraturan kebencanaan. Nanti kalo mau tahu besarnya coba ngobrol sama pak M. Beliau kan dulu lama di BA-BUN, mestinya lebih paham bagaimana pengelolaannya disana.</p>	TM-6	Dana Kontijensi	Program Penanggulangan Bencana dan Pendanaan dari APBN	Pengalokasian Anggaran Penanggulangan Bencana
TM	<p>Untuk <b>dokumen yang bisa diacu yaitu dokumen RPJMN, disana tertuang apa yang menjadi focus pembangunan, termasuk penanggulangan bencana, Renas juga dapat digunakan sebagai referensi, karena telah menghimpun berbagai dokumen yang akan diwujudkan dalam aksi nyata.</b> Bisa <i>browsing</i> ada kok renas, kan itu dokumen nasional jadi dipublikasikan untuk diketahui semua elemen didalamnya.</p>	TM-7	Dana Siap Pakai	Analisis Alokasi Anggaran Penanggulangan Bencana pasca RSPP	Pengalokasian Anggaran Penanggulangan Bencana
TM	<p><b>kegiatan lintas ini belum efektif ya, karena memang</b></p>	TM-8	Dokumen yang diacu dalam penanggulangan bencana	Penyusunan Model Informasi Kinerja Anggaran Tematik Bencana (Logic Model)	Model Informasi Kinerja Anggaran Tematik Bencana
TM	<p><b>kegiatan lintas ini belum efektif ya, karena memang</b></p>	TM-9	Kegiatan Lintas	Analisis Alokasi	Pengalokasian Anggaran



	<p>anggaranannya kan masih terkapling-kapling dalam masing-masing organisasi, akhirnya bisa inefisiensi karena memang seharusnya yang berlebih bisa dialihkan ke unit yang kurang dengan pendanaan secara sinergi. Jadi penanggulangan bencana ini kan perlu koordinasi dan sinkronisasi program ya untuk satu tema yaitu bencana. Namun sampe sekarang anggaran tematik bencana itu belum ada di sistem kita dan kebijakan kita. Dampaknya kan anggaran penanggulangan bencana itu tidak dapat di potret secara utuh gitu ya komprehensif bahasanya. Sekat-sekatnya cuma KRO yang notabene ini juga belum utuh bisa motret tahap anggaran kebencanaan dari prabencana tanggap darurat dan pasca bencana soalnya itu tadi ada alokasi anggaran terkait bencana yg berada diluar KRO kebencanaan itu banyak.</p>			<p>Anggaran Penanggulangan Bencana pasca RSPP</p>	<p>Penanggulangan Bencana</p>
TM	<p><b>Masih mas, duplikasi itu masih ada, utamanya buat bantuan-bantuan, biasanya ada kepentingan tertentu kenapa K/L itu tertarik dalam mengalokasikan</b></p>	TM-10	<p>Indikasi Duplikasi</p>	<p>Analisis Alokasi Anggaran Penanggulangan Bencana pasca RSPP</p>	<p>Pengalokasian Anggaran Penanggulangan Bencana</p>
TM	<p><b>Hibah untuk Rehab Rekon yang dikasih ke Daerah, melalui dana transfer daerah mulai tahun 2022, pertimbangannya daerah lebih mengetahui kebutuhan mana yg dapat diprioritaskan dulu untuk di benahi.</b></p>	<p>TM-11</p> <p>TM-12</p>	<p>Pendanaan Pasca Bencana</p>	<p>Analisis Alokasi Anggaran Penanggulangan Bencana pasca RSPP</p>	<p>Pengalokasian Anggaran Penanggulangan Bencana</p>



	Misal ya bangun jembatan, rumah korban bencana, fasilitas-fasilitas lainnya terkait kebutuhan masyarakat. Untuk ini coba diskusi aja sama yang pernah di BA-BUN.		Fungsi Hibah Rehab Rekon Ke Pemda	Analisis Alokasi Anggaran Penanggulangan Bencana Pasca RSPP	Pengalokasian Anggaran Penanggulangan Bencana
TM	<p>Sepertinya ada datanya, bentar ya. Kayaknya bappenas dan BNPB pernah memetakan ini, waktu itu pendekatannya dengan melihat usulan dari aplikasi KRISNA. Hasil pemetaan berdasarkan aplikasi Krisna Bappenas, pada Tahun 2017 ada 25 kementerian/Lembaga yang memiliki program/kegiatan yang berkaitan dengan penanggulangan bencana dengan nilai sebesar Rp11,198 triliun. Hasil pemetaan tahun 2018 terdapat 26 kementerian/lembaga yang memiliki program/kegiatan yang berkaitan dengan penanggulangan bencana dengan nilai sebesar Rp9,301 triliun. Hasil pemetaan tahun 2019 ada 27 kementerian/lembaga yang memiliki program/kegiatan yang berkaitan dengan penanggulangan bencana dengan nilai sebesar Rp12,42 triliun.</p> <p>Trus kalo pemetaan BNPB di dalam FGD kalo ga salah waktu itu, Tahun 2015 anggaran penanggulangan bencana sebesar Rp15,29 triliun, Tahun 2016 anggaran</p>	<p>TM-13</p> <p>TM-14</p>	<p>Pemetaan Bappenas</p> <p>Pemetaan BNPB</p>	<p>Analisis Alokasi Anggaran Penanggulangan Bencana pasca RSPP</p> <p>Analisis Alokasi Anggaran Penanggulangan Bencana Pasca RSPP</p>	<p>Pengalokasian Anggaran Penanggulangan Bencana</p> <p>Pengalokasian Anggaran Penanggulangan Bencana</p>

<p>penanggulangan bencana sebesar Rp19,86 triliun, dan Tahun 2017 anggaran penanggulangan bencana sebesar Rp53,67 triliun.</p> <p>Untuk pasca RSPP di tahun 2020 sepertinya belum ada data terbaru.</p>				
---	--	--	--	--

### Proses Coding Partisipan RS

Ket	Transkrip Wawancara	Ref	Inti Informasi	Subtema	Tema
RS	<p><b>Ya dalam penganggaran jangka pendek dapat diidentikkan dalam satu tahun anggaran</b> misalnya pada RKP kan disana penjabaran RPJMN, bisa dipake itu,</p>	RS-1	Periode Jangka Pendek dalam penganggaran	Penyusunan Model Informasi Kinerja Anggaran Tematik Bencana <i>(Logic Model)</i>	Model Informasi Kinerja Anggaran Tematik Bencana
RS	<p>Negara ini kan punya sumber daya, jadi bisa anggaran masuk kesana, personil, kemudian bahkan <b>BMN yang dimiliki oleh unit yang berkaitan langsung dengan bencana juga dapat sebagai input, kan pemeliharannya telah dialokasikan oleh negara.</b></p>	RS-2	Input dapat berupa BMN	Penyusunan Model Informasi Kinerja Anggaran Tematik Bencana <i>(Logic Model)</i>	Model Informasi Kinerja Anggaran Tematik Bencana

### Proses Coding Partisipan Y

Ket	Transkrip Wawancara	Ref	Inti Informasi	Subtema	Tema
Y	<p><b>Pada tanggap darurat, biasanya terkait dengan ketika kegiatan itu terjadi, apa yang dibutuhkan untuk melakukan pertolongan kepada korban, bagaimana cara meminimalisasi korban.</b> Untuk penggunaan anggaran DIPA kita yang bukan dari DSP untuk bantuan-bantuan, pengarahan</p>	Y-1	Kegiatan pada Tanggap Darurat	Analisis Alokasi Anggaran Penanggulangan Bencana pasca RSPP	Pengalokasian Anggaran Penanggulangan Bencana

<p>terkait bencana, kajian cepat, strategi dalam pemerataan logistik, untuk DSP sebagai pendampingan komando dan pengerahan sumber daya darurat dari pihak aparat dan basarnas, bantuan kebencanaan untuk darurat, kemudian ada juga yang buat menambah pendanaan untuk operasi darurat, penanganan korban dan pengungsi, penyelamatan dan evakuasi korban serta pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi, pemenuhan infrastruktur darurat. Kemudian rehabilitasi rekonstruksi kita berperan di fasilitasi dan pembinaan pemerintah daerah, koordinasi kebijakan yaitu misalnya melaksanakan kebijakan pemulihan dan peningkatan sosial ekonomi dan sumber daya alam pascabencana, pelayanan publik lainnya biasanya melakukan fasilitasi pemulihan dan peningkatan sosial ekonomi dan sumber daya alam pascabencana, layanan fasilitasi pemulihan dan peningkatan sosial ekonomi dan sumber daya alam pascabencana, perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.</p>				
---	--	--	--	--

### Proses Coding Partisipan F, SBP, GCP, MNR

Ket	Transkrip Wawancara	Ref	Inti Informasi	Subtema	Tema
F	<p>Sebentar saya cek data RKAKL dulu, seingatku <b>alokasi pada PUPR termasuk upaya mitigasi bencana utamanya pada RO infrastruktur drainase, DAM, pengaman pantai, bendungan</b> konkritnya itu mungkin RO nya ya, pembangunan infrastruktur pembangunan drainase, Sabo DAM, Pengaman Pantai, Pengendali Banjir, Bendungan sebanyak 28 Bendungan di berbagai wilayah Indonesia diantaranya Bendungan Cibeet, Cijurey, Mbay, Keureuto, Rukoh, Lau Simeme, Sepaku Semoi, Cipanas, itu kegiatannya lintas tahun. Coba aja cek datanya di bi kurang lebih seperti itu.</p>	F-1	Alokasi anggaran PB pada PUPR	Analisis Alokasi Anggaran Penanggulangan Bencana pasca RSPP	Pengalokasian Anggaran Penanggulangan Bencana
GCP	<p>Baik pak, sebentar saya pelajari <b>pada dokumen RKA-K/L kami, anggaran tersebut tertuang pada tahap rehabilitasi untuk UMKM, dengan memberikan bantuan. Menurut kami peta tersebut telah mewakili apa tujuan dari anggaran tematik tersebut, hingga hal detil dapat tergambar posisinya dimana, memang kami focus sesuai tusi kami membantu UMKM pak.</b></p>	GCP-1	Alokasi anggaran PB pada Kemenkop UKM	Penyusunan Model Informasi Kinerja Anggaran Tematik Bencana (Logic Model)	Model Informasi Kinerja Anggaran Tematik Bencana

Y	<p><b>Model tersebut sudah mewakili, kami berperan di sistem peringatan dini melalui siaran kepada masyarakat terkait informasi kebencanaan.</b></p> <p>Untuk RO nya 5145 QMA 003 Program Produksi Siaran Tanggap Bencana Prioritas Nasional</p> <p>5146 QMA 003 Produksi Siaran Tanggap Bencana Prioritas Nasional.</p>	MNR-2	Alokasi anggaran PB pada LPP-RI	Penyusunan Model Informasi Kinerja Anggaran Tematik Bencana (Logic Model)	Model Informasi Kinerja Anggaran Tematik Bencana
---	--	-------	---------------------------------	---	--



## LAMPIRAN VI

### LEMBAR KERJA TRIANGULASI

#### Tema I: Pengalokasian Anggaran Penanggulangan Bencana Pemerintah Pusat Berdasarkan RSPP

No	Temuan Penelitian	Teknik/Sumber Data	
		Wawancara	Dokumen
1	Dalam menyusun anggaran penanggulangan bencana, pendanaan program dan kegiatan penanggulangan bencana harus berdasarkan regulasi yang berlaku sebagai dasar pembebanan belanja publik.	<p><i>“Anggaran bencana di APBN itu ya sebenarnya dialokasikan di K/L sesuai dengan aturan yang berlaku, dalam pengalokasian anggaran harus ada dasar hukumnya kan. supaya bisa didanai APBN...” (AR-1)</i></p> <p><i>“Lho ya kalo K/L mengalokasikan anggaran itu dasarnya ya peraturan to, mau itu Undang-Undang, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, kemudian tinggal ditelaah urgensi dan keterkaitannya dengan prioritas pemerintah...” (AR-2)</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU Nomor 24 Tahun 2007               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pasal 63 diatur mekanisme pengelolaan dana penanggulangan bencana</li> <li>b. Pasal 69 ayat (4) diatur bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan bantuan santunan duka cita dan kecacatan bagi korban bencana</li> </ol> </li> <li>2. PP 22 Tahun 2008 Pasal 4 ayat 1 dan 2 diatur bahwa dana penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab bersama pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang berasal dari APBN.</li> <li>3. Dokumen Rencana Nasional Aksi Penanggulangan Bencana (RENAS PB) 2020-2024 pada Subbab Pola Pendanaan Halaman 96 diatur mengenai pendanaan penanggulangan bencana dapat bersumber dari APBN.</li> </ol>
2.	Pendanaan untuk kesiapsiagaan bencana berupa dana kontijensi berada pada DIPA BNPB, Dana Siap Pakai (DSP) berada pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara	<p><i>“Dana kontijensi itu adanya di DIPA BNPB untuk kesiapsiagaan, DSP itu adanya BA-BUN untuk berjaga-jaga kalo kondisi darurat”</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PP 22 Tahun 2008               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pasal 6 Ayat 1 dan 2 diatur bahwa dana kontijensi bencana disiapkan dalam APBN dan ditempatkan dalam anggaran BNPB</li> <li>b. Pasal 6 Ayat 4 diatur bahwa dana siap pakai bencana harus selalu tersedia sesuai dengan</li> </ol> </li> </ol>

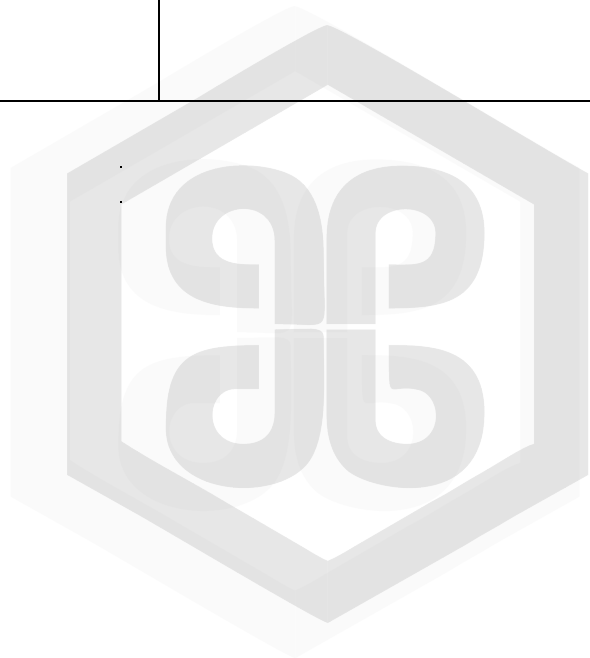
No	Temuan Penelitian	Teknik/Sumber Data	
		Wawancara	Dokumen
			<p>kebutuhan pada saat tanggap darurat.</p> <p>2. Dokumen Rencana Nasional Aksi Penanggulangan Bencana (RENAS PB) 2020-2024 pada Subbab Dana Kedaruratan halaman 98 diatur mengenai dana siap pakai berdasarkan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang ditetapkan oleh Kepala BNPB nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (DSP).</p>
3.	<p>Dalam penerapan RSPP untuk major project penanggulangan bencana kegiatan lintas unit eselon II belum efektif sehingga berpotensi duplikasi</p>	<p><i>“Tujuan penerapan RSPP ya itu tadi, menjamin belanja yang dialokasikan berkualitas, artinya sesuai antara apa yang dikeluarkan oleh negara dengan manfaat yang di dapat...” (AR-3)</i></p> <p><i>“kegiatan lintas ini belum efektif ya, karena memang anggarannya kan masih terkapling-kapling dalam masing-masing organisasi, akhirnya bisa inefisiensi karena memang seharusnya yang berlebih bisa dialihkan ke unit yang kurang dengan pendanaan secara sinergi” (TM-10)</i></p> <p><i>“Kalo bicara anggaran penanggulangan bencana, ndak bisa cuma lihat BPNB, kan masnya sudah tahu toh kalo money follow program itu keroyokan gitu melaksanakannya, tapi ya seharusnya ndak lepas dari tusi” (TM-1)</i></p>	<p>1. SEB RSPP Nomor S-. 122/MK.2/2020 dan B.517/M.PPN/D.8/ PP.04.03/05/2020 menyebutkan bahwa pada lingkup redesain program, program teknis lintas yang dilaksanakan oleh lebih dari satu K/L. Pada lingkup redesain kegiatan teknis lintas dilaksanakan satu atau lebih eselon II.</p> <p>2. Laporan Monitoring dan Evaluasi Itjen Kemenkeu Nomor: LAP- 92/IJ.6/2021 Tanggal : 6 Oktober 2021 bahwa masih terdapat karena data/informasi program lintas belum terintegrasi antara sistem perencanaan dengan sistem penganggaran sehingga tidak dapat dilakukan pengendalian dan pemantauan secara langsung atas pelaksanaan major project tahun berjalan.</p>

No	Temuan Penelitian	Teknik/Sumber Data	
		Wawancara	Dokumen
		<p><i>“Masalah klasik dalam penganggaran kita yaa itu tadi, sulitnya mengkoordinasikan supaya menghindari tumpang tindih pengalokasian anggaran dalam kegiatan karena berbagai K/L sejatinya melakukan kegiatan yang sama”</i> (AR-7)</p> <p><i>“masih mas, duplikasi utamanya buat bantuan-bantuan, biasanya ada kepentingan tertentu kenapa K/L itu tertarik dalam mengalokasikan...”</i> (TM-11)</p> <p><i>“Solusinya dari duplikasi ini ya itu tadi kembali ke tugas pokok dan fungsi masing-masing K/L dengan koordinasi oleh Bappenas dan BPNB”</i> (AR-8)</p> <p><i>“Perlu koordinasi dan sinergitas terkait kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dimasing-masing Kementerian/Lembaga sesuai tugas pokok dan fungsinya”</i> (AR-6)</p>	<p>Hal ini menunjukkan masih perlu perbaikan dalam penyusunan RKA-K/L TA 2021 dalam mencapai tujuan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) yaitu <i>money follow program</i> serta keselarasan antara dokumen perencanaan dan penganggaran dengan mendudukan masing-masing K/L sesuai tugas dan fungsinya.</p>
4.	Banyak alokasi anggaran penanggulangan bencana dialokasikan pada KRO Non Kebencanaan	<p><i>“tagging Anggaran Tematik Bencana ini baru dalam tahap rekomendasi ke pimpinan, existing telah berjalan penandaan secara KRO, sudah ada rumahnya walau tidak semua anggaran bencana masuk kesitu...”</i> (AR-11)</p> <p><i>“Selain dana kontijensi, dana siap pakai, sebenarnya banyak K/L yang memakai KRO bencana dalam pengalokasian pendanaan bencana serta kegiatan yang terkait peraturan kebencanaan”</i> (TM-8)</p> <p><i>“tidak semua anggaran bencana itu masuk ke KRO</i></p>	<p>Dokumen RKA-K/L seluruh K/L dengan basis informasi kinerja pada DIPA AWAL (dilakukan olah data informasi kinerja dengan metode output basis termasuk turunannya hingga detail menggunakan <i>keyword</i> “bencana”)</p>



No	Temuan Penelitian	Teknik/Sumber Data	
		Wawancara	Dokumen
		<i>kebencanaan</i> mas, banyak yang belum sesuai, K/L cenderung melihat dari kegiatannya apa, bukan muatan untuk mendukung kebencanaan itu” (TM-2)	
5.	Terdapat variasi jumlah anggaran penanggulangan bencana bergantung metode penghitungan	<p>“<i>Hasil pemetaan berdasarkan aplikasi Krisna Bappenas, pada Tahun 2017 ada 25 kementerian/Lembaga yang memiliki program/kegiatan yang berkaitan dengan penanggulangan bencana dengan nilai sebesar Rp11,198 triliun. Hasil pemetaan tahun 2018 terdapat 26 kementerian/lembaga yang memiliki program/kegiatan yang berkaitan dengan penanggulangan bencana dengan nilai sebesar Rp9,301 triliun. Hasil pemetaan tahun 2019 ada 27 kementerian/lembaga yang memiliki program/kegiatan yang berkaitan dengan penanggulangan bencana dengan nilai sebesar Rp12,42 triliun</i>”</p> <p>“<i>...pemetaan BNPB di dalam FGD kalo ga salah waktu itu, Tahun 2015 anggaran penanggulangan bencana sebesar Rp15,29 triliun, Tahun 2016 sebesar Rp19,86 triliun, dan Tahun 2017 sebesar Rp53,67 triliun</i>” (TM-14)</p> <p>“<i>Kenaikan anggaran bencana pada tahun 2020 tentunya untuk tanggap darurat penanganan COVID-19 yang angkanya melonjak waktu itu ...</i>”(AR-17)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 63 dan 69 ayat (4) pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana ini mengatur beberapa hal penting, antara lain sumber, alokasi, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan dan pertanggungjawaban pada tahap prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana.</li> <li>2. PP 22 Tahun 2008 merincikan sumber pendanaan penanggulangan bencana namun belum memberikan pedoman kriteria penanggulangan bencana yang dapat didanai masing-masing K/L.</li> <li>3. Dokumen Renas PB 2020-2024 pada subbab 3 tentang Tata Kelola, Perencanaan, dan Pembiayaan (Investasi) Penanggulangan Bencana Di Daerah menyebutkan bahwa Berdasarkan pemantauan dan evaluasi program 2017 terdapat 31 K/L yang terlibat pada penanggulangan bencana dengan total anggaran Rp54,670 triliun dengan metode penghitungan berdasarkan rencana aksi dan laporan akhir kegiatan masing-masing K/L.</li> <li>4. DIPA K/L tahun 2019-2023 dengan fluktuasi</li> </ol>

No	Temuan Penelitian	Teknik/Sumber Data	
		Wawancara	Dokumen
			pagu di semua K/L utamanya pada tahun 2019 dan 2020 karena adanya penghematan anggaran memengaruhi anggaran prioritas termasuk penanggulangan bencana untuk dialihkan ke penanganan pandemi COVID-19 (bencana non alam)



POLITEKNIK  
STIA LAN  
JAKARTA 5  
JAKARTA

**Tema II: 2. Model Informasi Kinerja Anggaran Tematik Bencana dalam rangka Optimalisasi RSPP**

No	Temuan Penelitian	Teknik/Sumber Data	
		Wawancara	Dokumen
1	Dalam memudahkan identifikasi dan analisis anggaran penanggulangan bencana yang tersebar di setiap K/L, perlu dilakukan penandaan anggaran untu membangun instrument anggaran tematik	<p><i>“anggaran tematik bencana merupakan satu isu dalam pembahasan lintas unit Kementerian Keuangan, bahkan sudah masuk rekomendasi program secondment”</i> (AR-11)</p> <p><i>“tagging Anggaran Tematik Bencana ini baru dalam tahap rekomendasi ke pimpinan, existing telah berjalan penandaan secara KRO, sudah ada rumahnya walau tidak semua anggaran bencana masuk kesitu...”</i> (AR-11)</p> <p><i>“Ya memang seharusnya dituangkan dalam lingkup anggaran tematik penanggulangan bencana supaya terintegratif dan mudah untuk di trace ketika ada aspek yang tidak berjalan sesuai perencanaan...”</i> (AR-12)</p> <p><i>“anggaran tematik itu buat rekomendasi menyusun kebijakan fiskal, jadi pemerintah nantinya bisa melihat perlu dana segini lho untuk tematik ini....”</i> (TM-4)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. RPJMN 2019-2020 tertuang bahwa penanggulangan bencana termasuk dalam prioritas pemerintah dengan target peningkatan ketangguhan bencana menuju kesejahteraan yang berketahanan untuk pembangunan berkelanjutan.</li> <li>2. Dokumen Rencana Nasional Aksi Penanggulangan Bencana (RENAS PB) 2020-2024 pada Subbab Rencana Aksi Anggaran, berupa kebijakan alokasi anggaran dalam implementasi RENAS PB. Kebijakan dan alokasi anggaran dalam implementasi RENAS PB perlu mendapat dukungan dari Kementerian Keuangan.</li> </ol>

No	Temuan Penelitian	Teknik/Sumber Data	
		Wawancara	Dokumen
2.	Membangun Anggaran Tematik Bencana memerlukan penandaan/tagging pada level Rincian Output	<p><i>“Output basisnya, karena tingkatan ini dapat dipantau capaiannya dan besaran anggarannya berapa... memudahkan juga to ngidentifikasi dan menelaah gimana keterkaitannya dengan tahap-tahap yang ada di kegiatan bencana itu.” (AR-4)</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) Tahun 2024 terdapat empat fokus kebijakan jangka pendek mendukung arah kebijakan fiskal 2024. Empat fokus tersebut adalah Pengendalian Inflasi, Penghapusan Kemiskinan ekstrim, Penurunan Stunting, dan Peningkatan Investasi. Peningkatan investasi diperlukan ketangguhan bencana dengan kepastian pendanaan melalui APBN</li> <li>2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 pada penjelasan penyusunan RKA-K/L menyebutkan bahwa penelaahan meliputi aspek tagging/penandaan anggaran.</li> <li>3. Pedoman Penandaan Anggaran Perubahan Iklim Edisi 2 menyebutkan bahwa penandaan anggaran berada pada level output (RO)</li> </ol>
3.	Identifikasi hasil berupa outcome jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang dapat dibangun dengan dokumen kebijakan pemerintah	<p><i>Impact</i>  <i>Mewujudkan Indonesia Tangguh Bencana untuk Pembangunan Berkelanjutan. (Hasil FGD)</i></p> <p><i>Outcome Jangka Pendek</i>  <i>Sasaran Program Penanggulangan Bencana yang memuat produk barang dan jasa sesuai RSPP (Hasil FGD)</i></p> <p><i>“Ya dalam penganggaran jangka pendek dapat diidentikkan dalam satu tahun anggaran” (RS-1)</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rencana Induk Penanggulangan Bencana 2020-2044 yang berarti merupakan dampak yang ingin dicapai dalam kurun waktu yang sangat Panjang yaitu Pembangunan Berkelanjutan.</li> <li>2. RPJMN 2019-2024 Buku IV halaman 23 ditindaklanjuti dengan RKP pada masing-masing tahun anggaran pada masing-masing K/L yang berperan dalam penanggulangan bencana</li> <li>3. Renas PB 2020-2024 pada halaman 43 bab Kebijakan dan Strategis Nasional telah dicantumkan isu dan arah kebijakan beserta tujuan jangka pendek dan jangka Panjang.</li> </ol>



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN**  
**DIREKTORAT ANGGARAN BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN**  
**KEBUDAYAAN**

Gedung Sutikno Slamet, Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1, Jakarta Pusat, DKI Jakarta Telp. (021) 3849315 Fax. (021) 3847157

Nomor : S-126/AG/AG.4/2023 20 September 2023  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 4 (empat) berkas  
Hal : Undangan FGD Model Anggaran Tematik Bencana pada Subdit Abid  
Risnov dan Kebencanaan

Yth. 1. Ali Rizal  
2. Tri Maryugo  
3. Rahmat Saptono  
4. Galih Anggriawan  
5. Awan Supriyatno  
6. Septian BP  
7. Ahmad Tamzil

Sehubungan dengan proposal inovasi Model Anggaran Tematik Bencana yang disusun oleh mahasiswa/pegawai a.n Galih Anggriawan, bersama ini kami mengundang saudara untuk hadir dalam FGD pendalaman Model Anggaran Tematik Kebencanaan:

Hari, Tanggal : Jumat, 22 September 2023  
Waktu : 13.00 WIB s.d. 15.00  
Tempat/media : Ruang Rapat Lantai 7, Gedung Sutikno Slamet

Dalam rangka menjaga keberlangsungan Zona Integritas – Wilayah Bebas Korupsi (ZI – WBK), Direktorat Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan berkomitmen untuk memberikan layanan secara berintegritas, profesional, dan bersih dari korupsi dan gratifikasi.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Saudara/i, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Subdirektorat Anggaran  
Bidang Riset Inovasi dan Kebencanaan



Ditandatangani secara elektronik  
Fajar Hasri Ramadhana





**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN**

**DIREKTORAT ANGGARAN BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN**  
GEDUNG SUTIKNO SLAMET, JL. DR. WAHIDIN NO. 1 JAKARTA PUSAT 10710 KOTAK POS 2435 JKP  
10024 TELEPON (021) 3866117; FAKSIMILE (021) 3505118; SITUS: WWW.ANGGARAN.DEPKEU.GO.ID

**NOTULENSI FORUM GRUP DISCUSSIONS  
SIMULASI INOVASI INSTRUMEN ANGGARAN TEMATIK BENCANA  
DENGAN METODE MODEL LOGIKA**

Pada hari ini, Jumat tanggal 22 September 2023 pukul 13.00 s.d 16.30 telah dilaksanakan simulasi dari penyusunan model logika anggaran tematik bencana bertempat di Gedung Sutikno Slamet Lantai 7 Jalan Doktor Wahidin Jakarta Pusat. FGD ini sebagai tindak lanjut surat undangan Subdirektorat Anggaran Bidang Riset Inovasi dan Kebencanaan Nomor S-126/AG/AG.4/2023 tanggal 20 September 2023 hal Undangan FGD Simulasi Anggaran Tematik Kebencanaan dan Surat Penelitian Mahasiswa Izin Belajar Nomor 1848/STIA 1.1/PPS.02.03 tanggal 23 Agustus 2023 hal Permohonan Izin Penelitian Mahasiswa Program Magister Terapan Politeknik STIA LAN Jakarta a.n Galih Anggriawan.

FGD tersebut dihadiri oleh perwakilan pejabat fungsional analis anggaran sebagai kelompok kerja dan evaluator eksternal dengan rincian pegawai:

1. Ali Rizal, JFAA Ahli Madya Direktorat Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
2. Rahmat Saptono, JFAA Ahli Muda Subdirektorat Anggaran Bidang Riset Inovasi dan Kebencanaan, Direktorat Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
3. Tri Maryugo, JFAA Ahli Muda Subdirektorat Anggaran Bidang Riset Inovasi dan Kebencanaan, Direktorat Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
4. Galih Anggriawan, JFAA Ahli Pertama Subdirektorat Anggaran Bidang Riset Inovasi dan Kebencanaan, Direktorat Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
5. Awan Supriyatno, JFAA Ahli Muda Subdirektorat Anggaran Bidang Riset Inovasi dan Kebencanaan, Direktorat Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
6. Septian B.P, JFAA Ahli Pertama Subdirektorat Anggaran Bidang Sosial dan Kepresidenan, Direktorat Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
7. Muh.Masduqi, JFAA Ahli Muda Subdirektorat Anggaran Bidang Sosial dan Kepresidenan, Direktorat Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
8. Ahmad Tamzil, Analis Anggaran, Subdirektorat Anggaran Bidang Pekerjaan Umum Agraria dan Tata Ruang, Direktorat Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman.

**Hasil Forum Group Discussion**

Inovasi instrumen anggaran tematik bencana, merupakan ide inovasi dari optimalisasi Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran yang belum tersedia pada Sistem Referensi SAKTI, untuk itu diperlukan penentuan model logika sebagai evaluasi program yang berjalan sebelumnya (*evidence based*). Model penentuan logika program menggunakan *logic model* dari Knowlton dan Phillips (2015) dengan tahapan elemen yang telah disepakati sebagaimana langkah berikut.

1. Identifikasi Hasil atas Strategi yang Dilakukan  
*Impact* atau dampak yang ingin diwujudkan dalam kegiatan penanggulangan bencana ialah Mewujudkan Indonesia Tangguh Bencana untuk Pembangunan Berkelanjutan. Hal ini sebagaimana analisis dan identifikasi dari RPJMN hingga menjadi dokumen kebijakan pada dalam Rencana Induk Penanggulangan Bencana 2020-2044.
2. Perubahan Bertahap Yang Akan Diharapkan Menunjukkan Kemajuan Menuju Dampak.
  - a) *Outcome* Jangka Pendek  
*Output* jangka pendek penanggulangan bencana tidak lepas dari indikator 1) Komprehensifnya regulasi, tata kelola, sistem penanggulangan bencana; 2) Sarana dan prasarana kebencanaan yang memadai 3) Sumber daya manusia yang semakin tanggap bencana; dan 4) Peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penjabaran dari penentuan

*outcome* jangka pendek ini melalui pengejawantahan indikator strategis pada dokumen terkait penanggulangan bencana pada renas PB.

b) *Outcome Intermediate*

Outcome Intermediate yang akan dicapai melalui Periode RPJMN yaitu:

- 1) Penurunan Indeks Risiko Bencana; hal ini dapat berarti akselerasi pembangunan sangat terkait dengan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI), semakin tinggi indeks yang diperoleh maka kerentanan bencana yang mengakibatkan kerugian secara fiskal akan semakin tinggi, otomatis akan mengurangi laju akselerasi pembangunan.
- 2) Penurunan angka kematian korban bencana; sebagaimana ditetapkan dalam kerangka Sendai ditetapkan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) sangat diharapkan untuk menurunkan angka korban kematian rata-rata yang terdampak bencana per 100.000 masyarakat terdampak
- 3) Kenaikan Indeks Pemulihan Pasca Bencana (*Post Disaster Recovery Index*) merupakan angka nilai hasil pemulihan dari pengukuran indikator.

c) *Outcome* Jangka Panjang

*Outcome* Jangka Panjang merupakan tahapan yang lebih dahulu dirasakan sebelum dampak. RPJMN dan Renas PB dicantumkan bahwa dalam jangka panjang hingga 2030 akan dilakukan *Peningkatan Ketangguhan Bencana Menuju Kesejahteraan Yang Berketahanan Untuk Pembangunan Berkelanjutan*.

3. Kegiatan yang Diperlukan untuk Setiap Strategi

- a) Kegiatan penguatan dan harmonisasi sistem, regulasi serta tata kelola penanggulangan bencana yang efektif dan efisien, dengan strategi penguatan dan harmonisasi legalitas peraturan penanggulangan bencana.
- b) Peningkatan sinergi antar K/L dan pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana, dengan strategi menerapkan riset inovasi dan teknologi kebencanaan dengan kerjasama kolaboratif multi pihak
- c) Penguatan investasi pengelolaan risiko bencana sesuai dengan proyeksi peningkatan risiko bencana, dengan strategi; meningkatkan sarana prasarana mitigasi serta mengurangi risiko bencana; menguatkan sistem kesiapsiagaan bencana;
- d) Pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana dengan (*collaborative social engineering*);
- e) Peningkatan perlindungan kerentanan lingkungan pada wilayah rawan bencana.  
(Sumber Rencana Aksi Penanggulangan Bencana 2020-2024)

4. Sumber Daya/*Input*

Input dari model logika ini ialah anggaran yang dialokasikan pada DIPA dan Barang Milik Negara yang mendukung model.

5. Identifikasi Keluaran yang Mencerminkan Pencapaian

Digunakan output/RO berulang yang terkait penanggulangan bencana pada seluruh K/L dengan sumber data dari *bussines intelligence* Ditjen Anggaran, serta mengacu pada Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Bencana dan dibandingkan dengan Dokumen Perencanaan (RPJMN 2019-2024) serta Naskah Nota Keuangan 2021-2024.

- Hasil analisis Intervensi Pemerintah pada Program Penanggulangan Bencana

Grup Klasifikasi Output	Jenis Klasifikasi Output (KRO)
Kerangka Regulasi	Peraturan
	Kebijakan
	Kajian
Kerangka Pelayanan Umum	Bantuan
	Operasi
Kerangka Investasi Fisik	Sarana
	Prasarana
	OM Sarana
	OM Prasarana
Kerangka Investasi SDM Sosial dan Ekonomi	Pelatihan
	Penelitian dan Pengembangan
Administrasi Pemerintahan (Internal)	Tata Kelola Pemerintahan
	Pembinaan Pemerintah Daerah dan Desa

- Identifikasi per tahapan:

Identifikasi *Output* pada tahap pencegahan dan mitigasi

Jenis Klasifikasi Output	Rincian Output	K/L
Prasarana	Pembangunan Infrastruktur Hijau, Penahan Longsor, Kolam Retensi, Check Dam, Sabo DAM, Normalisasi Peningkatan Kapasitas Aliran Sungai, Pembangunan Bandara daerah terisolir	Kementerian PUPR
Konservasi	Rehabilitasi Ekosistem Hutan produksi dan mangrove, Ekosistem Pesisir, Lahan Gambut, Pulau Pulau Kecil	Kementerian LHK
Sarana	Penyediaan Sarana Air di Kawasan Rawan Air, Sistem peringatan dini terpadu Multi Ancaman dan data center hidrometeoro-logi, khususnya banjir, longsor, dan kekeringan	Kementerian PUPR, BRIN, BMKG, Kementerian ESDM
Kebijakan/Kajian	Kajian Interdisiplin Indonesia Early Warning System (InaTEWS), Kajian Pemetaan dan Analisis Risiko Bencana, Kajian Risk Culture Pengetahuan Kebencanaan, Pengembangan Kebijakan <i>Risk Financing</i> , Penyusunan Kebijakan Penegakan Rencana Tata Ruang dan Bangunan, Kebijakan penanganan ketahanan pangan, Kebijakan penanggulangan Krisis Kesehatan	BNPB, BRIN, Kementerian LHK, Bappenas, BMKG, Kemenkes
Informasi dan Komunikasi Publik	Data dan Peta Risiko Bencana, Data Desa Tangguh Bencana, Data Teknologi Informasi Kebencanaan, Peta Jejaring Kapasitas Logistik, Rencana Induk Ketahanan Wilayah	BNPB
Pengawasan dan Pengendalian	Pembinaan dan Pengawasan Bangunan dan Gedung	Kementerian PUPR
Koordinasi dan Kerjasama	Koordinasi dan Fasilitas Rehabilitasi dengan Pemda, Sinkronisasi Analisis Risiko Bencana dengan Pembangunan Infrastruktur	Bappenas, BNPB
Tata Kelola Pemerintahan	Pengembangan Sistem Penanggulangan Bencana Terintegrasi termasuk Sistem Peringatan Dini, Tata Kelola Air dan DAS	BNPB
Kerjasama	Inovasi Kolaborasi multipihak dalam alternatif pembiayaan PB	Bappenas, Kemenkeu
Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	Pedoman Kompetensi Bidang Bencana, Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Bencana pada Pemda, Protokol Kejadian PB, Pedoman Desa Tangguh Bencana	BNPB
Peraturan	Peraturan Penataan Bangunan dan Lingkungan, Peraturan Pengamanan Infrastruktur Vital Kebencanaan (Misal Peralatan Peringatan Dini)	BNPB
Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	Pemantauan dan Pelaporan Kegiatan Standar Pelayanan Minimal Kebencanaan di Daerah	BNPB, Bappenas
Penelitian dan Pengembangan	Teknologi terapan untuk pencegahan, mitigasi bencana	BRIN, BMKG

Tabel Identifikasi *Output* pada tahap kesiapsiagaan

Jenis Klasifikasi Output	Rincian Output	K/L Pelaksana
Pembinaan Pemerintah, Daerah dan Desa	Percepatan pembentukan desa tangguh bencana, pembinaan dan pelatihan kapasitas kesiapsiagaan pada masyarakat di daerah rawan bencana (masyarakat desa, sekolah, aparat), Penguatan respon peringatan dini KLB penyakit menular/zoonosis	Bappenas, BNPB, Kemdagri, Kemendes PDT, Kemensos, Kemdikbud, Kementerian PPPA, Kemenkes, BPBD Daerah



<b>Jenis Klasifikasi Output</b>	<b>Rincian Output</b>	<b>K/L Pelaksana</b>
Pelatihan	Standardisasi Kompetensi Personil aparaturnya, Simulasi Pelatihan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	Bappenas, BNPB, BPBD Daerah TNI, dan Polri
Sarana dan Prasarana	Sarana prasarana pelatihan kebencanaan	Bappenas, BNPB, BPBD Daerah TNI, dan Polri

Tabel Identifikasi *Output* pada tahap Tindakan

<b>Jenis Klasifikasi Output</b>	<b>Rincian Output</b>	<b>K/L Pelaksana</b>
Operasi	Operasi Search and Rescue (SAR), Pembentukan klaster logistik, Sistem Komando Penanganan Darurat, Jejaring dukungan kapasitas logistik, Jalur Distribusi Logistik	Basarnas, BNPB, TNI, Polri, Kemensos, Kemenkes
Bantuan	Dana bantuan kedaruratan, Kebutuhan Dasar Korban Bencana yang terpenuhi berdasarkan database	Kementerian Sosial, BNPB, Bappenas
Sarana	Peralatan pendukung operasi SAR yang dipenuhi	Basarnas, BNPB, TNI, Polri, Kemensos
Prasarana	Prasarana pendukung operasi SAR yang dibangun	Basarnas, BNPB
Kajian/Kebijakan	Kebijakan tanggap darurat operasi SAR, peta terdampak bencana	Basarnas, BNPB
Penelitian dan Pengembangan	Riset tanggap darurat (vaksin, obat-obatan)	BRIN, BNPB, Bappenas

Tabel Identifikasi *Output* pada tahap Pemulihan

<b>Jenis Klasifikasi Output</b>	<b>Rincian Output</b>	<b>K/L Pelaksana</b>
Bantuan	Bantuan korban terdampak, Pemberian Perlindungan Sosial Pascabencana, Dampungan Masyarakat	BNPB, Kemenkop UKM, Kemensos
Sarana	Sarana pelayanan publik bidang pendidikan, kesehatan, konektivitas (darat dan laut), lingkungan hidup, teknologi informasi, ekonomi kreatif	Bappenas, BNPB, Kementerian PUPR
Prasarana	Infrastruktur pelayanan publik yang direhabilitasi pada daerah terdampak, Pembangunan hunian masyarakat terdampak	Bappenas, BNPB, Kementerian PUPR
Tata Kelola Pemerintahan	Pendampingan tata kelola pasca bencana pada tahap Rehabilitasi dan rekonstruksi	BNPB, Bappenas



Notulis

Galih Anggriawan



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN**  
**DIREKTORAT ANGGARAN BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN**  
GEDUNG SUTIKNO SLAMET, JL. DR. WAHIDIN NO. 1 JAKARTA PUSAT 10710 KOTAK POS 2435 JKP  
10024 TELEPON (021) 3866117; FAKSIMILE (021) 3505118; SITUS: WWW.ANGGARAN.DEPKEU.GO.ID

**DAFTAR HADIR FORUM GRUP DISCUSSIONS**  
**SIMULASI INOVASI INSTRUMEN ANGGARAN TEMATIK BENCANA**  
**DENGAN METODE MODEL LOGIKA**  
Jumat tanggal 22 September 2023

No	Nama	NIP	Paraf
1			
2	Ali Rizal	197208241993011001	
3	Rahmat Saptono	197208031993011001	
4	Galih A	198804032009121002	
5	Titi M Hawati	198209242009012008	
6	Masduki	197705071999031001	
7	Awan S	197302021994021002	
8	Siti Habibah	198403242003122003	
9			
10			

Nomor : 1848/STIA 1.1/PPS.02.3 Jakarta, 23 Agustus 2023  
Sifat : Biasa  
Lampiran : Proposal Tesis  
Hal : Permohonan Ijin Penelitian Mahasiswa Program Magister Terapan  
Politeknik STIA LAN Jakarta

Yth. Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan  
Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan  
Gedung Sutikno Slamet Lantai 7/8  
Jl. Dr. Wahidin Raya No.1 Jakarta Pusat

Bersama ini dengan hormat kami informasikan, bahwa salah satu mahasiswa kami:

Nama : Galih Anggriawan  
NPM : 2243021082  
Jurusan : Administrasi Publik  
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara  
Konsentrasi : Manajemen Keuangan Negara  
Judul Tesis : Model Informasi Kinerja Anggaran Tematik Bencana pada  
Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan

akan melakukan penelitian dalam rangka penulisan Tesis di Instansi Bapak.

Sehubungan dengan itu, kami mohon kiranya Bapak berkenan memberi ijin dan membantu mahasiswa kami tersebut untuk mendapatkan bahan-bahan/data/informasi yang dibutuhkannya.

Demikian atas perkenan, bantuan dan kerjasama Bapak, kami ucapkan terima kasih.



a.n. Direktur

Direktur I Bidang Akademik, NA

Dr. Mala Sondang Silitonga, MA.

Tembusan:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
2. Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta;
3. Kajur/Sekjur Administrasi Publik;
4. Kaprodi/Sekprodi Magister Terapan.



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN**  
**DIREKTORAT ANGGARAN BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN**  
**KEBUDAYAAN**

GEDUNG SUTIKNO SLAMET LANTAI 8, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710 KOTAK POS 2435  
TELEPON (021) 3451028, FAKSIMILE (021) 3450430; SITUS [www.anggaran.kemenkeu.go.id](http://www.anggaran.kemenkeu.go.id)

**SURAT KETERANGAN**  
**NOMOR KET-1/AG.4/AG.44/2023**

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Fajar Hasri Ramadhana;  
NIP : 197110281992031001;  
Jabatan : Kepala Subdirektorat Anggaran Bidang Riset Inovasi dan Kebencanaan;

dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa/pegawai,

Nama : Galih Anggriawan;  
NIP : 198804032009121002;  
Jabatan : Analis Anggaran Ahli Pertama;

telah melakukan penelitian dalam rangka penyusunan tesis pada tanggal 25 Agustus 2023 s.d 25 September 2023 pada Subdirektorat Anggaran Bidang Riset Inovasi dan Kebencanaan dengan judul **Model Informasi Kinerja Anggaran Tematik Bencana pada Direktorat Jenderal Anggaran**.

Surat keterangan ini diberikan untuk keperluan administrasi penyelesaian tugas akhir berdasarkan Surat Izin Melanjutkan Pendidikan di Luar Kedinasan Nomor NOMOR SI-5/AG.1/2022 untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 2 Oktober 2023

a.n. Direktur Anggaran Bidang  
Pembangunan Manusia dan  
Kebudayaan  
Kepala Subdirektorat Anggaran  
Bidang Riset, Inovasi dan  
Kebencanaan



Ditandatangani secara elektronik  
Fajar Hasri Ramadhana

Tembusan:

1. Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Anggaran



## RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama Penulis	:	Galih Anggriawan
Tempat dan Tanggal Lahir	:	Klaten, 3 April 1988
Alamat Rumah dan Nomor Telepon Genggam	:	Bogor Raya Permai FD-04 No.16 Kel. Curug Kec. Kota Bogor Barat Kota Bogor (081327322344)
Email/Surel	:	galihakla10@gmail.com
Status Perkawinan	:	Menikah
Nama Instansi	:	Kementerian Keuangan
Alamat Instansi dan Nomor Telepon	:	Jl. Dr. Wahidin Raya No.1, Ps. Baru, Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10710
Jabatan	:	Analisis Anggaran Ahli Pertama
Pangkat dan Golongan	:	III/B
Riwayat Pendidikan	:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. SD Negeri 5 BB Agung (1994-2000)</li><li>2. SLTP Negeri 2 Negara (2000-2003)</li><li>3. SMA Negeri 1 Negara (2003-2006)</li><li>4. Program Diploma III Kebendaharaan Negara Sekolah Tinggi Akuntansi Negara Jakarta (2006-2009)</li><li>5. Sarjana Administrasi Bisnis Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara Jakarta (2011-2012)</li></ol>
Riwayat Pekerjaan	:	Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (2009-Sekarang)